ANALISIS PROGRAM USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA (UP2K) DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KECAMATAN BUBON KABUPATEN ACEH BARAT

SKRIPSI

OLEH

HERNIJAL
1705905010024

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH – ACEH BARAT
2021

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MEULABOH-ACEH BARAT
Laman: www.utu.ac.id Email: fisip@utu.ac.id Kode Pos 23615

Meulaboh, 4 Oktober 2021

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jenjang : Strata 1 (S-1)

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudari:

Nama : **Hernijal**
Nim : **1705905010024**

Dengan Judul: **ANALISIS PROGRAM USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA (UP2K) DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KECAMATAN BUBON KABUPATEN ACEH BARAT**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Teuku Umar Meulaboh.

Mengesahkan:

Pembimbing Utama

Zuhrizal Fadhly, M.Si
NIDN. 0019048405

Mengetahui:

Dekan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Basri, SH., MH
NIP. 196307131991021002

Ketua Program Studi
Jurusan Administrasi Negara

Fadhil Ilhamsyah, S.IP.,M.Si
NIDN. 0017109101

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MEULABOH-ACEH BARAT
Laman: www.utu.ac.id Email: fisip@utu.ac.id Kode Pos 23615

Meulaboh, 4 Oktober 2021

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jenjang : Strata 1 (S-1)

LEMBAR PERSETUJUAN KOMISI UJIAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudari:

Nama : Hernijal

Nim : 1705905010024

Dengan judul : **Analisis Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) dalam Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat**

Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian pada tanggal 30 September 2021 dan memenuhi syarat untuk diterima.

Menyetujui

Komisi Ujian

		Tanda Tangan
1. Ketua	: Zuhrizal Fadhly, M.Si	.....
2. Sekretaris	: Nodi Marefanda, M.AP	.....
3. Anggota	: Sri Wahyu Handayani, MA	.....

Mengetahui:
Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara

Fadhil Ilhamsyah, S.IP.,M.Si
NIDN. 0017109101

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HERNIJAL**

Nim : 1705905010024

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa di dalam skripsi adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertasi, buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penjiplakan. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan, maka saya menyatakan kesediaan untuk dibatalkan sebahagian atau seluruh hak gelar kesarjanaan saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Meulaboh, Oktober 2021
Saya yang membuat pernyataan,

HERNIJAL
1705905010024

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HERNIJAL**

Nim : 1705905010024

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa di dalam skripsi adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertasi, buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penjiplakan. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan, maka saya menyatakan kesediaan untuk dibatalkan sebahagian atau seluruh hak gelar kesarjanaan saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Meulaboh, Oktober 2021
Saya yang membuat pernyataan,

HERNIJAL
1705905010024

KATA PERSEMBAHAN

Bismillahirahmanirahim

"Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia yang mengajar manusia dengan pena, Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuiya"
(QS: Al-'Alaq 1-5)
Alhamdulillah...Alhamdulillahirobbil'alamin.....

Puji syukur kupanjatkan kehadirat Allah SWT atas takdir-Mu telah Kau jadikan aku manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Sholawat berserta salam tak lupa kupanjatkan kepada Rasulullah SAW, manusia terbaik yang selalu menjadi sumber inspirasi untuk menjadi lebih baik dalam segala aspek kehidupan. Semoga keberhasil ini menjadi langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku.

Lantunan Al-fatihah beriring Sholawat dalam silahku merintih, menadahkan doa dalam syukur yang tiada terkira, terima kasih untukmu. Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk Ayanda dan Ibundaku tercinta, yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku.,, Ayah,.. Mamak,.. terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbananmu.. dalam hidupmu demi hidupku kalian ikhlas mengorbankan segala perasaan tanpa kenal lelah, dalam lapar berjuang separuh nyawa hingga segalanya.. maafkan anakmu Ayah.,, Mamak.,, masih saja ananda menyusahkanmu...
Ya Allah ya Rahman ya Rahim.. Terimakasih telah kau tempatkan aku diantara kedua malaikatmu yang setiap waktu ikhlas menjagaku, mendidikku, membimbingku dengan baik, ya Allah berikanlah balasan setimpal syurga firdaus untuk mereka dan jauhkanlah mereka nanti dari panasnya sengat api nerakamu.

*Untukmu Ayah (**DARMI**), dan Mamak (**MAIMUNAH**)..*
Terimakasih.. we always loving you.

*Terima kasih selanjutnya untuk Abang-abangku (**Indis Kurniawan** dan **Defrimal**) dan juga Kakak-kakak iparku (**Marwinda** dan **Cut Dewi Putri**), yang luar biasa dalam memberi dukugan dan mendo'akanku dalam menggapai tujuan seperti yang diharapkan. Dan kepada keponakanku (Muhammad Firdus, Muhammad Fadhil, Muhammadun, dan Muhammadin) serta terima kasih kepada keluarga besar yang telah mendukung dan mensupport saya selama ini.*

*Terima kasih juga yang tak terhingga untuk dosen pembimbing saya bapak (**Zuhrizal Fadhly, M. Si**) serta dosen penguji saya bapak (**Nodi Marefanda, M.AP**) dan juga ibu (**Sri Wahyu Handayani, MA**) yang telah memberikan saya ilmu yang bermanfaat, dan mau meluangkan waktu untuk bimbingan saya dan berkat bapak dan ibu lah saya bisa meraih gelar sarjana ini.*
Ucapan terima kasih ini saya persembahkan juga untuk sahabat-sahabatku
*(**Dedek Marfirah, Murni Yustika, Resi Ayu Santia, Arisna, Hikmah Nihayati, Jissilia, Marziana Ulva**, serta kepada semua teman-teman angkatan 2017 yang telah memberikan semangat, dorongan dan bantuan hingga selesai skripsi ini, kebersamaan yang indah selama kita kuliah.*
Hanya sebuah karya kecil dan untaian kata-kata ini kupersembahkan kepada kalian semua. Termakasih beribu terimakasih kuucapkan. Atas segala kekhilafan salah dan kekuraganku, kurendahkan hati serta diri menjabat tangan meminta beribu-ribu kata maaf tercurah.

Skripsi Ini Kupersembahkan.

HERNIJAL

BIODATA

Nama Lengkap	:	**HERNIJAL**
Nim	:	1705905010024
Tempat Tanggal Lahir	:	Alue Lhok, 20 November 1999
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Agama	:	Islam
Alamat Tempat Tinggal	:	Gampong Alue Lhok Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat
Nama Orang tua	:	Ayah : DARMI Ibu : MAIMUNAH
Pekerjaan Orang tua	:	Ayah : Petani Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang tua	:	Gampong Alue Lhok Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat
Pendidikan yang telah ditempuh	:	MIN Layung (2011) MTs Swasta Bubon (2014) SMA Negeri 1 Bubon (2017) S-1 FISIP UTU Meulaboh (2021)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Swt atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Analisis Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) dalam Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat".

Selama penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi dengan penuh cinta penulis persembahkan untuk Ayahanda dan Ibunda tercinta, serta keluarga tercinta yang telah memberikan segala bentuk pengorbanan, nasihat, kasih sayang tiada batas dan do'a tulusnya demi keberhasilan penulis.
2. Bapak Zuhrizal Fadhly, M.Si., selaku dosen Pembimbing yang begitu penulis sanjung dan banggakan, telah menjadi orang tua ke dua selama membimbing, memberi arahan, memotivasi, dan bersedia meluangkan waktunya untuk penulis selama penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Jasman J. Ma'ruf, SE, MBA., selaku Rektor Universitas Teuku Umar.
4. Bapak Basri, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.

5. Bapak Fadhil Ilhamsyah, S.IP., M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Meulaboh Kabupaten Aceh Barat.
6. Para Dosen dan Staf akademik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
7. Sahabat-sahabat di Jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 2017, Mahasiswa/I Fisip yang selalu bersama di saat kuliah dan teman-teman yang telah banyak membantu skripsi yang sederhana ini tetapi mempunyai manfaat.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT meridhai dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya. Aamiin.

Alue Peunyareng, Oktober 2021
Penulis

HERNIJAL

ABSTRACT

The Family Income Increase Business Program (UP2K) is a development program that favors women in the village whose activities are included in the POKJA II for Family Empowerment and Welfare (PKK). There are several gampongs in Bubon Sub-district that have received assistance from UP2K either individually or in groups, such as several units of sewing machine assistance and assistance for cake making. The purpose of this study was to determine the process of the UP2K program in empowering women and to find out what factors were the obstacles in the implementation of the UP2K program in empowering women in Bubon District, West Aceh Regency. The method used in this research is using a descriptive qualitative approach. Data collection techniques used are interviews and documentation. There were 11 informants in this study. Data analysis was carried out using qualitative data analysis techniques.

The results showed that the implementation of the Family Income Improvement Business (UP2K) program in empowering women in Bubon District, West Aceh Regency starting from the assessment, alternative planning, implementation stages, evaluation stages and termination stages had not run optimally. This can be seen from the stages of implementation where the socialization for the UP2K program has not been comprehensive in all villages, so that not all people know about the UP2K program. The factors that became obstacles in the implementation of the UP2K program in empowering women in Bubon District, West Aceh Regency were data collection from the village about UP2K members that were not well targeted, the lack of donors willing to fund the UP2K program, the lack of cooperation of UP2K members in informing about income or income and the level of borrowing is not large so that the business is experiencing less development.

Keywords: *Program, Women's Empowerment, Efforts to Increase Family Income (UP2K).*

ABSTRAK

Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) salah satu program pembangunan yang berpihak pada perempuan di desa yang pelaksanaan kegiatannya masuk dalam POKJA II Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Ada beberapa gampong di Kecamatan Bubon sudah menerima bantuan dari UP2K baik secara pribadi atau kelompok, seperti beberapa unit bantuan mesin jahit dan bantuan untuk pembuatan kue. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program UP2K dalam pemberdayaan perempuan dan untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan program UP2K dalam pemberdayaan perempuan di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif secara deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 11 orang. Analisa data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) dalam pemberdayaan perempuan di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat dimulai dari *assesment*, perencanan alternatif, tahapan pelaksanaan, tahapan evaluasi dan tahapan terminasi belum berjalan dengan optimal. Hal ini dapat dilihat dari tahapan pelaksanaanya dimana sosialisasi untuk program UP2K ini belum menyeluruh di semua gampong, sehingga tidak semua masyarakat yang mengetahui program UP2K. Faktor-Faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program UP2K dalam pemberdayaan perempuan di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat adalah pendataan dari gampong tentang angggota UP2K yang kurang tepat sasaran, masih kurangnya donatur yang mau mendanai untuk program UP2K, kurangnya kooperatif anggota UP2K dalam memberitahu tentang penghasilan atau pendapatannya dan pemberian modal usaha yang tidak besar sehinga usaha kurang mengalami perkembangan.

Kata Kunci : Program, Pemberdayaan Perempuan, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K).

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI ..... **ii**
LEMBAR PERSETUJUAN KOMISI UJIAN ..... **iii**
LEMBAR PERNYATAAN ..... **iv**
LEMBAR PERSEMBAHAN ..... **v**
BIODATA ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
ABSTRACT ..... **ix**
ABSTRAK ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xi**
DAFTAR TABEL ..... **xiii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xv**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 4
1.3 Tujuan Penelitian 4
1.4 Manfaat Penelitian 5
1.5 Sistematika Penulisan 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **6**
2.1 Penelitian Terdahulu 6
2.2 Konsep Pemberdayaan 8
2.2.1 Tujuan Pemberdayaan 10
2.2.2 Tahapan Pemberdayaan 16
2.3 Tinjauan Tentang PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) 18
2.4 UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga) 19
2.4.1 Pengertian UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga) 19
2.4.2 Sumber Permodalan UP2K 21
2.4.3 Tujuan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga(UP2K) 21
2.4.4 Pengorganisasian Tugas dan Tanggung Jawab Kelompok UP2K-PKK 22
2.4.5 Pembinanan UP2K-PKK 26
2.5 Pemberdayaan Perempuan 26
2.5.1 Pengertian Pemberdayaan Perempuan 26
2.5.2 Tahapan Pemberdayaan Perempuan 27
2.5.3 Tujuan Pemberdayaan Perempuan 28
2.5.4 Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Perempuan 29
2.6 Kerangka Teori 31

BAB III METODE PENELITIAN 32
3.1 Metode Penelitian 32
3.2 Lokasi Penelitian 33
3.3 Informan 33
3.4 Sumber Data 34
3.5 Teknik Pengumpulan Data 35
3.6 Instrumen Penelitian 36
3.7 Teknik Analisis Data 37
3.8 Pengujian Kredibilitas Data 39
3.9 Jadwal Penelitian 39

BAB IV HASIL PENELITIAN 41
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 41
4.2 Gambaran Umum PKK Kecamatan Bubon 42
4.3 Hasil Penelitian 42
4.3.1 Implementasi program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) dalam pemberdayaan perempuan di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat 46
4.3.2 Kendala dalam pelaksanaan program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) dalam pemberdayaan perempuan di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat 58

BAB V PEMBAHASAN PENELITIAN 61
5.1 Implementasi program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) dalam pemberdayaan perempuan di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat 61
5.2 Kendala dalam pelaksanaan program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) dalam pemberdayaan di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat 71

BAB VI PENUTUP 74
6.1 Kesimpulan 74
6.2 Saran 75

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel : 3.1. Informan penelitian. 33

Tabel : 3.2. Jadwal Penelitian. 40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Teori..... 31
Gambar 4.1. Peta Wilayah Kecamatan Bubon..... 41
Gambar 4.2. Struktur Pengurus PKK Kecamatan Bubon Tahun 2021 44
Gambar 5.1. Alur Pelaksanaan Realisasi Bantuan UP2K..... 67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemberdayaan merupakan salah satu upaya untuk menghadapi persoalan kependudukan terkait dengan pembangunan dibidang kesejahteraan sosial. Salah satu persoalan yang sampai saat ini menjadi persoalan kependudukan adalah permasalahan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan. Masalah pemberdayaan perempuan erat kaitanya dengan masalah ketenagakerjaan, hal ini terlihat ketika mencari nafkah bukan hanya masalah kaum laki-laki akan tetapi perempuan juga memiliki adil didalamnya. Seperti dalam bidang pertanian, kaum perempuan mempunyai kontribusi yang cukup signifikan yaitu dari penanaman kembali, pembenihan, pemupukan, panen, pasca panen, pengepakan dan pemasaran. Oleh sebab itu perempuan mempunyai peran penting dalam menggerakkan roda masyarakat maupun dalam skala nasional (Putri, 2018).

Pemberdayaan perempuan harus dimulai dari diri perempuan itu sendiri. Perempuan yang telah memiliki kesadaran kritis dan keterampilan yang memadai kemudian akan memberikan kontribusi baik ditingkat rumah tangga, lingkungan, komunitas, bahkan negara. Terdapat berbagai macam program dan strategi yang dilakukan pemerintah untuk mendukung pemberdayaan perempuan, salah satunya yakni melalui Program UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga) adalah sebuah organisasi kemasyarakatan desa yang mampu mengerakan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, juga berperan dalam kegiatan pertumbuhan desa (Ekautri, 2012).

Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) salah satu program pembangunan yang berpihak pada perempuan di desa yang pelaksanaan kegiatannya masuk dalam POKJA II Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Program UP2K ini dijadikan sebagai suatu implementasi pemberdayaan perempuan, sehingga tercipta potensi, daya, dan karakter perempuan yang tidak kalah penting dengan laki-laki. UP2K sebagai gerakan yang tumbuh dari bawah dengan perempuan sebagai penggerak dalam membangun, membina, dan membentuk keluarga guna mewujudkan kesejahteraan keluarga sebagai unit kelompok terkecil dalam masyarakat (Putri, 2018).

Program UP2K merupakan bagian dari kegiatan POKJA II PKK yang modalnya bersumber dari bantuan pembangunan desa atau bantuan lainnya dari pemerintah, maupun dari swadaya masyarakat itu sendiri. Program UP2K disahkan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Hal tersebut dilakukan pemerintah karena mengingat kondisi kaum perempuan saat ini, dimana tingkat pendidikan dan tingkat keterampilan yang rendah, serta tingkat produktivitas yang rendah pula sehingga mengakibatkan tidak mampu mendukung perekonomian rumah tangga (Kadar, dkk. 2016).

Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat merupakan salah satu kecamatan penerima bantuan modal dalam program keluarga. Kecamatan Bubon terdiri dari 17 gampong dan 7.786 penduduk. Ada beberapa gampong di Kecamatan Bubon sudah menerima bantuan dari UP2K baik secara pribadi atau kelompok, seperti gampong Layung, gampong Seumuleng dan gampong Blang Sibeutong. Bantuan dari UP2K tersebut berupa beberapa unit bantuan mesin jahit dan bantuan untuk

pembuatan kue dalam bentuk modal usaha yang diberikan sebesar Rp. 1.800.000,-/orang yang diperuntukkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan pelaksanaan program tersebut diharapkan masyarakat penerima bantuan kemudian akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat penerima bantuan.

Dasar dari pemberian bantuan adalah melihat kepada besarnya tingkat kemiskinan dari masing-masing gampong tersebut dan pertimbangan lainnya seperti dari segi perkembangan serta peran aktifnya kelompok PKK di gampong masing-masing. Dengan bantuan ini diharapkan terjadi peningkatan pendapatan kaum perempuan, kesempatan berusaha sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Berdasarkan hasil pengamatan awal peneliti, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) dalam Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah implementasi program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) dalam pemberdayaan perempuan di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat ?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) dalam pemberdayaan perempuan di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) dalam pemberdayaan perempuan di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) dalam pemberdayaan perempuan di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat menambah wacana keilmuan yang berkaitan dengan analisis program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) dalam pemberdayaan perempuan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Kepada Lembaga PKK selaku pelaksana program UP2K dari pemerintah agar dapat meningkatkan dan mengembangkan kinerja dalam upaya peningkatan kemampuan dalam bidang keterampilan dan ekonomi.
2. Kepada peneliti, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dengan kenyataan yang ada di lapangan serta sebagai pengembangan pengetahuan peneliti untuk bekal di masa yang akan datang.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini maka penulis telah membagi tulisan ini kedalam bagian yang melitputi:

Bab I : Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, hipotesis penelitian dan sistematika penulisan

Bab II : Tinjauan pustaka, yang memuat tentang teori-teori yang mendukung penelitian.

Bab III : Metodelogi penelitian yang terdiri dari metode penelitian, lokasi dan sumber data dan teknik pengumpulan data, informan penelitian, teknik analisis data, uji kredibilitas data dan jadwal penelitian.

Bab IV : Hasil penelitian, yang berisikan tentang hasil-hasil yang diperoleh baik dalam bentuk fakta maupun sebagai hasil analisis.

Bab V : Pembahasan, yang berisikan tentang bagian yang mendiskusikan hasil-hasil atau fakta-fakta yang diperoleh dan mengonfirmasikannya dengan temuan-temuan atau pendapat-pendapat terdahulu dari studi kepustakaan.

Bab VI : Kesimpulan dan saran yang berisikan kesimpulan-kesimpulan dari masalah yang dibahas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berikut ini terdapat penelitian terdahulu yang di jadikan referensi dan perbandingan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini:.

Putri Astini (2011) UIN Sunan Kalijaga, yang berjudul "Peran PKK dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui Kegiatan *Home Industry* di Dusun Kaliwaru, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta". Hasil penelitian tersebut adalah tentang pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi melalui *home industry*. Dalam penelitian ini pemberdayaan yang dilakukan untuk perempuan sudah cukup maksimal. Adapun temuan-temuan pemberdayaan perempuannya adalah pemberdayaan dilakukan melalui kegiatan membuat produk, latihan dan penyuluhan. Dalam upaya meningkatkan perekonomian perempuan diadakan juga arisan, simpan pinjam, tabungan, dan jimpitan beras. Partisipasi ibu-ibu yang mengikuti kegiatan PKK juga cukup besar namun masih bersifat pasif.

Rosalia Indriyati Saptaningsih (2015), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang berjudul "Pemberdayaan Perempuan Desa Untuk Mengurangi Kemiskinan". Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan desa melalui pemberdayaan perempuan ini dapat membawa perubahan kelompok perempuan menjadi termotivasi untuk berkembang serta untuk mendapatkan penghasilan. Dengan pemberdayaan ini perempuan desa mampu mengembangkan potensinya untuk membentuk usaha ekonomi produktif

berbasis lokal sehingga dapat membentuk kemandirian masyarakat, serta dapat mengurangi kemiskinan.

Mulia Astuti (2012) yang berjudul "Pemberdayaan Perempuan Miskin Berbasis Pemanfaatan Sumberdaya Lokal Melalui Pendekatan Sosial *Enterpreneurship* (Studi Kasus di Daerah Tertinggal, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pemberdayaan perempuan miskin dengan pemanfaatan sistem sumber daya lokal untuk dapat mengentaskan mereka dari kemiskinan, melalui pendekatan sosial *entrepreneurship* ini ternyata mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perempuan miskin, dengan menciptakan lapangan kerja baru bagi perempuan serta dengan memanfaatkan potensi ikan lokal.

Dari beberapa penelitian diatas, semuanya melakukan penelitian dengan pembahasan yang sama yaitu mengenai pemberdayaan perempuan melalui sebuah program dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup perempuan. Namun beberapa penelitian diatas belum ada yang secara khusus membahas mengenai pemberdayaan perempuan yang dilakukan sebuah lembaga perempuan (PKK) melalui program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K). Sementara yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah kasus dan objek penelitiannya. Dalam penelitian ini penulis menjadikan perempuan di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat sebagai objek penelitian dalam pemberdayaan perempuan melalui program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) untuk meningkatkan taraf hidup keluarga.

2.2 Konsep Pemberdayaan

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemerkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka (Suharto, 2010).

Menurut Aziz dkk (2011), pemberdayaan adalah sebuah konsep yang fokusnya adalah kekuasaan. Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus *(break down)* dari hubungan antara subjek dan objek. Proses ini mementingkan pengakuan subjek akan kemampuan atau daya yang dimiliki objek. Secara garis besar proses ini melihat pentingnya mengalirkan daya dari subjek ke objek Hasil akhir dari pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula objek menjadi subjek (yang baru), sehingga relasi sosial yang nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi sosial antar subyek dengan subyek lain.

Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat bersangkutan. Masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat serta inovatif, tentu memiliki keberdayaan tinggi. Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur-unsur yang memungkinkan masyarakat untuk bertahan *(survive)* dan dalam pengertian dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat ini menjadi sumber dari apa yang dalam wawasan politik pada tingkat nasional disebut ketahanan nasional.

Usman (2009) mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut *community self-*

reliance atau kemandirian. Dalam proses ini masyarakat didampingi untuk membuat analisis masalah yang dihadapi, dibantu untuk menemukan alternatif solusi masalah tersebut, serta diperlihatkan strategi memanfaatkan berbagai kemampuan yang dimiliki.

Definisi pemberdayaan masyarakat, dimana secara khusus mengkaji tentang pemberdayaan dengan berbagai macam sudut pandang. Akan tetapi secara umum dapat disimpulkan bahwa berbagai teori yang diungkapkan diatas bermuara pada pemahaman yang hampir sama, yakni memberikan daya kepada mereka yang lemah agar dapat mandiri dalam menjalankan kehidupannya sehingga dikatakan berdaya.

Menurut Fahrudin (2012), pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat yang dilakukan dengan upaya sebagai berikut:

a. *Enabling*, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan cara mendorong (*encourage*), memotivasi dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
b. *Empowering*, yaitu meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata seperti penyediaan berbagai masukan

(input) serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang dapat membuat masyarakat menjadi makin berdayaan.

c. *Protecting*, yaitu melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem perlindungan bagi masyarakat yang menjadi subjek pengembangan. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Melindungi dalam hal ini dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

2.2.1 Tujuan Pemberdayaan

Pada bagian sebelumnya telah dikemukan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk meningkatkan daya seseorang, baik itu berupa pengetahuan ataupun ketrampilan supaya kemampuan seseorang dapat lebih baik dari sebelumnya. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pasti memiliki tujuan jelas yang nantinya akan berperan penting untuk terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera dari sebelumnya.

Menurut Mardikanto (2014) tujuan pemberdayaan masyarakat ada enam poin, yaitu:

1. Perbaikan kelembagaan (*better institution*) Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.

2. Perbaikan usaha (*better business*)

   Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibisnislitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.

3. Perbaikan pendapatan (*better income*)

   Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.

4. Perbaikan lingkungan (*better environment*)

   Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

5. Perbaikan kehidupan *(better living*)

   Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

6. Perbaikan masyarakat (*better community*)

   Kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Dari pernyataan tersebut, berarti tujuan dari pemberdayaan masyarakat pada intinya untuk melakukan perbaikan aspek-aspek yang ada di dalam masyarakat, sehingga dapat merubah dan menjadikan kehidupan lebih baik dari sebelumnya. Untuk itu, dalam proses pemberdayaan diperlukan partisipasi dari masyarakat

agar program-progam pemberdayaan yang telah di susun dapat memberi manfaat bagi warga masyarakat dan lembaga itu sendiri.

Dalam program pemberdayaan masyarakat, partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan. Partisipasi menurut *United Nation* dalam Karsidi (2014) diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaataan hasil dan evaluasi program pemberdayaan. Istilah partisipasi sering juga diartikan dalam kaitannya dengan pembangunan, sebagai pembangunan masyarakat yang mandiri, perwakilan, mobilitas sosial, pembagian sosial, yang merata terhadap hasil-hasil pembangunan, penetapan kelembagaan khusus, demokrasi politik dan sosial, reformasi sosial, atau bahkan yang disebut revolusi rakyat (Slamet, 2014). Dalam Karsidi (2014), menyebutkan “partisipasi sebagai tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat”. Sedangkan dalam kamus sosiologi diartikan bahwa partisipasi merupakan “keikutsertan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, diluar pekerjaan atau profesinya sendiri”.

Keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan tertentu, mulai dari perencanaan program pemberdayaan, pelaksanaan sehingga manfaat yang di dapat dari program pemberdayaan. Dengan begitu partisipasi merupakan sebuah proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait untuk mengambil inisiatif menggunakan kebebasan untuk melakukan hal tersebut.

Dari definisi mengenai partisipasi masyarakat, kata kunci yang utama adalah adanya kesukarelaan anggota masyarakat untuk terlibat atau melibatkan diri.

Berkaitan dengan tingkat kesukarelaan masyarakat untuk berpartisipasi, Dusseldorp membedakan adanya beberapa jenjang kesukarelaan, antara lain (Mardikanto 2014):

a. Partisipasi spontan, yaitu peran serta yang tumbuh karena motivasi intrinsik berupa pemahaman, penghayatan, dan keyakinan sendiri. Jadi partisipasi bentuk ini terjadi tanpa adanya pemaksaan dari pihak luar.
b. Partisipasi terinduksi, yaitu peran serta yang tumbuh karena terinduksi oleh adanya motivasi ekstrinsik berupa bujukan, pengaruh atau dorongan dari luar meskipun yang bersangkutan tetap memiliki kebebasan penuh untuk berpartisipasi.
c. Partisipasi tertekan oleh kebiasaan, yaitu peran serta yang tumbuh karena adanya tekanan yang dirasakan sebagaimana layaknya warga masyarakat pada umumnya, atau peranserta yang dilakukan untuk mematuhi kebiasaan, nilai-nilai, atau norma-norma yang dianut oleh masyarakat setempat. Jika tidak berperan serta, khawatir akan tersisih atau dikucilkan masyarakatnya.
d. Partisipasi tertekan oleh alasan sosial ekonomi, yaitu peran serta yang dilakukan karena takut akan kehilangan status sosial atau menderita kerugian tidak memperoleh bagian manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan.
e. Partisipasi tertekan oleh peraturan, yaitu peran serta yang dilakukan karena takut menerima hukuman dari peraturan atau ketentuan yang sudah diberlakukan.

Mardikanto (2014), menjelaskan ada tiga variasi bentuk partisipasi ditunjukan masyarakat, juga berkaitan dengan kemauan politik (*political will*) penguasa untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi yaitu:

1. Partisipasi terbatas, yaitu partisipasi yang hanya digerakkan untuk kegiatan-kegiatan tertentu demi tercapainya tujuan pembangunan, tetapi untuk kegiatan tertentu yang dianggap menimbulkan kerawanan bagi stabilitas nasional dan kalangan pembangunan diatasi. Jadi kegiatan yang di lakukan di sini tidak yang begitu berat dan menimbulkan hal-hal yang dapat membahayakan stabiltas nasional.
2. Partisipasi penuh (*full schale participation*), artinya partisipasi seluas-luasnya dalam segala aspek kegiatan pembangunan. Disini keikutsetaan anggota akan program pemberdayaan masyarakat sangat luas.
3. Mobilisasi tanpa partisipasi, artinya partisipasi yang dibangkitkan pemerintah (penguasa), tetapi masyarakat sama sekali tidak diberi kesempatan untuk mempertimbangkan kepentingan pribadinya dan tidak diberi kesempatan untuk turut mangajukan tututan maupun mempengaruhi jalannya kebijaksanaan pemerintah.

Menurut Pusic dalam Aristo (2014) Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dapat di wujudkan dengan berbagai bentuk diantaranya:

1. Pikiran (*Psychological participation*), merupakan partisipasi yang di berikan dalam bentuk ide-ide, pengetahuan ataupun ilmu oleh seorang sukarelawan yang bergabung dalam sebuah lembaga pemberdayaan masyarakat ataupun instansi lainnya.

2. Tenaga (*Physical participation*), merupakan partisipasi yang di berikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.
3. Pikiran dan tenaga (*Psychological participation dan Physical participation*), merupakan keikutsertaan seseorang dalam bentuk ilmu pengetahuan dan tenaga dalam pelaksanaan program pemberdayaan.
4. Keahlian (*Participation with skill*), memberikan dorongan melalui keahlian yang di milikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkan.
5. Barang (*Material participation*), bentuk partisipasi untuk melengkapi sarana dan prasarana pada sebuah lembaga sosial dalam suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat.
6. Uang (*Money participation*), bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.

Jadi dalam sebuah kegiatan pemberdayaan masyarakat, akan muncul partisipasi dari berbagai pihak yang ada di sekitarnya. Partisipasi tersebut dapat di wujudkan dengan bentuk yang berbeda-beda, baik yang abstrak ataupun yang kongkrid.

Menurut Westra (1976) dalam Mardikanto (2014) cara-cara dalam menggerakkan partisipasi masyarakat yaitu melalui:

a. Usaha ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang nyata. Ketika akan direncanakan program pemberdayaan masyarakat, yang terpenting adalah melihat apa yang paling banyak di butuhkan dan di minati oleh

masyarakat. Apabila program yang akan dilaksanakan banyak dibutuhkan dan menarik oleh mata masyarakat, maka yang akan terjadi partisipasi dari warga mayarakat akan sangat besar.

b. Usaha ini di dijadikan stimulasi terhadap masyarakat, yang berfungsi mendorong timbulnya jawaban yang dikehendaki. Stimulasi yang dimaksudkan adalah sebagai masukan dan yang nantinya akan di jadikan pengantar dalam menimbulkan jawaban yang dikehendaki.

c. Usaha itu di jadikan motivasi terhadap masyarakat yang berfungsi membangkitkan tingkah laku yang dikehendaki. Dalam program pemberdayaan motivasi dari yang akan melakukan pemberdayaan sangatlah penting. Dengan demikian secara sadar atau tidak sadar akan dapat membangkitkan tingkah laku yang dikehendaki.

Jadi pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep dalam upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan dapat memandirikan masyarakat. Partisipasi dari masyarakat merupakan perwujudan kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya program pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi.

2.2.2 Tahapan Pemberdayaan

Dalam pengembangan masyarakat lokal, terdapat beberapa tahapan intervensi, Menurut Isbandi Rukminto Adi (2010), yaitu:

1. Tahapan persiapan
2. Tahapan Assesment, dalam proses *assesment* dilakukan pengidentifikasian masalah (kebutuhan yang dirasakan atau *felt needs*) ataupun kebutuhan yang dieksperikan (*expressed needs*) dan juga sumber daya yang dimiliki komunitas sasaran.
3. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan. Pada tahap ini pelaku perubahan secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya.
4. Tahap pemformulasian rencana aksi, tahap ini merupakan tahapan yang kunci sebelum pelaksanaan program. Dalam tahap ini petugas memfasilitasi warga untuk menentukan prioritas program mana yang akan dilaksanakan untuk menjawab kebutuhan warga.
5. Tahap pelaksanaan (implementasi) program. Tahap ini merupakan tahap yang menentukan dalam proses pengembangan masyarakat. Tahapan-tahapan yang telah dilalui sebelumnya akan diuji dalam tahap ini. Oleh karena itu, baik petugas dengan warga maupun antar warga satu sama lain diharapkan mengupayakan dan menjaga komunikasi dan keharmonisan dalam pelaksanaan program.
6. Tahap evaluasi proses dan hasil perubahan. Pada tahap ini diharapkan adanya umpan balik yang berguna bagi proses pengembangan masyarakat. Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan oleh warga bersama petugas (*community worker*).

7. Tahap terminasi. Pada tahap ini mengakhiri secara formal intervensi dalam program pengembangan masyarakat. Berakhirnya program dalam pengertian di sini lebih dimaksudkan karena program telah sampai pada batas waktu yang telah direncanakan pada awalnya atau karena anggarannya sudah habis dan pihak penyandang dana telah menghentikan donasinya.

2.3 Tinjauan Tentang PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga)

Gerakan PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) merupakan gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat. Pemberdayaan keluarga meliputi segala upaya bimbingan, pembinaan dan pemberdayaan agar keluarga dapat hidup sejahtera, maju dan mandiri. Tim Penggerak PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang demi terlaksananya program PKK. Tim Penggerak PKK adalah warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, perorangan, bersifat sukarela, tidak mewakili organisasi, golongan, partai politik, lembaga atau instansi dan berfungsi sebagai perencana, pelaksana dan pengendali gerakan PKK (Ekautri, 2012).

Gerakan PKK bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Sasaran gerakan PKK adalah keluarga, baik di perdesaan maupun

perkotaan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan dan kepribadiannya dalam bidang :

a. Mental spiritual meliputi sikap dan perilaku sebagai Insan hamba Tuhan, anggota masyarakat dan warga negara yang dinamis serta bermanfaat, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
b. Fisik material meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, kesempatan kerja yang layak serta lingkungan hidup yang sehat dan lestari melalui peningkatan pendidikan, pengetahuan dan keterampilan (Harianto, 2017).

Kepengurusan PKK terdiri dari 4 (empat) Pokja (Kelompok Kerja) yang membidangi 10 Program Pokok PKK, yaitu meliputi:

1. Pokja I, mengelola program Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Program Gotong Royong.
2. Pokja II, mengelola program pendidikan dan ketrampilan dan pengembangan kehidupan berkoperasi.
3. Pokja III, mengelola program pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga
4. Pokja IV, mengelola program kesehatan, kelestarian lingkungan hidup dan perencnaan sehat (Harianto, 2017).

2.4 UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga)

2.4.1 Pengertian UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga)

UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga) merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga yang dicerminkan oleh meningkatnya kemampuan keluarga dalam memenuhi Program UP2K adalah salah satu program pembangunan yang berpihak pada perempuan di desa yang

pelaksanaan kegiatannya masuk dalam POKJA II Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Program UP2K ini dijadikan sebagai suatu implementasi pemberdayaan perempuan, sehingga tercipta potensi, daya, dan karakter perempuan yang tidak kalah penting dengan laki-laki (Putri, 2018).

Program UP2K yang dimaksud disini adalah sebuah program pemberdayaan ekonomi keluarga yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan cara memberdayakan potensi perempuan dalam bidang keterampilan usaha dengan sasaran utamanya adalah kaum perempuan. Dalam POKJA II terdapat dua pelaksanaan program yang diterapkan diantaranya ialah:

a. Pendidikan dan Keterampilan

   Pendidikan dan keterampilan mempunyai prioritas program meningkatkan kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan, kesadaran dan keterampilan keluarga yang mempunyai anak balita mengenai tumbuh kembang anak balita secara optimal sebagaimana melaksanakan dan mengembangkan kegiatan program Bina Keluarga Balita (BKB). Meningkatkan mutu dan jumlah pelatihan PKK dengan mengadakan pelatih atau *Training of trainer* (TOT).

b. Pengembangan kehidupan berkoperasi

   Prioritas program kehidupan berkoperasi dengan meningkatkan kelompok dan kualitas Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) selain menumbuhkan kesadaran serta kemampuan berwirausaha keluarga juga sebagai usaha menciptakan dan memperluas lapangan kerja. UP2K-PKK dengan memanfaatkan koperasi sebagai salah satu upaya perbaikan ekonomi keluarga dan

mendorong terbentuknya koperasi yang dikelola oleh PKK (Putri, 2018).

2.4.2 Sumber Permodalan UP2K

Adapaun sumber-sumber permodalan untuk pelaksanaan program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) adalah sebagai berikut:

a. Swadaya masyarakat

b. Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa (APBDes)

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota

d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi

e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

f. Lembaga Perbankan dan Non Perbankan (Koperasi)

g. Lembaga Donor

h. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

i. Lembaga keuangan kelurahan (Reno, 2019).

2.4.3 Tujuan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga(UP2K)

Terdapat dua tujuan pada Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Umum

Secara umum Program UP2K memiliki tujuan untuk membina dan mengembangkan usaha keluarga yang tergabung dalam kelompok atau perorangan sehingga secara bertahap mampu menjadi wiraswasta serta memungkinkan timbulnya kegiatan yang koperatif.

b. Tujuan Khusus

Secara Khusus terdapat beberapa tujuan dari program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), diantaranya ialah:

1) Membantu modal usaha bagi usaha ekonomi lemah untuk menumbuhkan kewiraswastaan.
2) Membantu pengembangan usaha bagi usaha yang membutuhkan penambahan modal
3) Membantu modal usaha untuk usaha perkreditan guna memenuhi kebutuhan modal dan mengurangi ketergantungan dari para pelepas uang.
4) Menumbuhkembangkan kegiatan usaha yang bersifat koperatif
5) Menciptakan peluang usaha baru
6) Menciptakan inovasi atau diversifikasi produk lokal (Reno, 2019).

2.4.4 Pengorganisasian Tugas dan Tanggung Jawab Kelompok UP2K-PKK

1. Pengorganisasian

Pengorganisasian Kelompok UP2K-PKK menurut buku Pedoman Teknis Pengelolaan UP2K-PKK adalah:

a. Kelompok Khusus UP2K-PKK

Kelompok Khusus UP2K-PKK adalah kelompok yang bertugas untuk mengkoordinir kelompok pelaksana Program UP2K-PKK (target sasaran) ditingkat desa atau kelurahan, yang terdiri dari kader-kader PKK atau tokoh masyarakat yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa selaku Pembina Tim Penggerak PKK Desa atau Kelurahan yaitu: (a) Kelompok Khusus mulai dari Pusat sampai

Desa/Kelurahan dikoordinir oleh Kelompok Kerja (Pokja) II pada masing-masing tingkatan. (b) Kepengurusan Kelompok Khusus UP2K-PKK di tingkat Desa/Kelurahan terdiri dari kader-kader PKK atau Tokoh Masyarakat yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa/Kelurahan selaku Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak-PKK Desa/Kelurahan. (c) Susunan Kepengurusan Kelompok Khusus UP2K-PKK Desa/Kelurahan, terdiri atas: Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota (Putri, 2018).

b. Kelompok Pelaksana UP2K-PKK

Kelompok Pelaksana UP2K-PKK adalah kelompok peserta yang beranggotakan dari keluarga-keluarga yang memiliki usaha serta tergabung dalam kelompok usaha bersama. Kelompok pelaksana yang memiliki usaha atau yang ingin mendirikan usaha perorangan atau kelompok yang tergabung dalam usaha bersama (Putri, 2018).

2. Tugas dan Tanggung Jawab Kelompok UP2K-PKK

a. Kelompok Khusus

1. Ketua Kelompok Khusus

a) Bertanggung jawab terhadap kelancaran pengelolaan UP2K-PKK yang dilaksanakan oleh kelompok pelaksana dalam bidang kelembagaan, administrasi serta kegiatan usaha. Berkoordinasi dengan unit-unit usaha lainnya, khususnya dengan unit produksi untuk kelancaran pemasaran.

b) Melaksanakan pembinaan kepada kelompok pelaksana di wilayahnya.

2. Sekretaris Kelompok Khusus
   1) Melaksanakan administrasi kelompok khusus sesuai petunjuk.
   2) Merekap data kegiatan usaha para kelompok pelaksana.
   3) Menyusun laporan kelompok khusus UP2K-PKK.
3. Bendahara Kelompok Khusus
   a) Membukukan dana usaha dari berbagai sumber.
   b) Mengeluarkan dana usaha yang diterima dari bendahara PKK desa atau kelurahan.
   c) Menyalurkan dana usaha kepada kelompok pelaksana berdasarkan ketentuan yang telah disetujui ketua kelompok khusus.
   d) Menerima dan membukukan angsuran dari kelompok pelaksana.
   e) Menyusun laporan perkembangan keuangan usaha bersama dengan sekretaris kelompok khusus (Putri, 2018).
4. Anggota Kelopok Khusus
   a) Melaksanakan tugas-tugas kelompok khusus sesuai petunjuk dan ketentuan.
   b) Membantu dan bekerjasama dengan Ketua, Sekretaris dan Bendahara kelompok khusus untuk kelancaran kegiatan usaha, sejak perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap kegiatan kelompok pelaksana (Putri, 2018).

b. Kelompok Pelaksana UP2K-PKK

1) Memanfaatkan dana usaha yang diterima untuk meningkatkan kegiatan usahanya dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang tersedia.
2) Mengatur penyisihan dari usaha yang diterimanya.
3) Menyampaikan iuran pengelolaan dan tabungan untuk pengembangan kelompok khusus UP2K-PKK Desa atau Kelurahan.
4) Mematuhi kebijakan atau ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.
5) Bertanggung jawab kepada ketua kelompok khusus desa atau kelurahan.

c. Tim Penggerak PKK

1) Pusat, 1) Menyusun Pedoman atau Petunjuk UP2K-PKK 2) Melakukan pembinaan, pemantauan dan pengendalian
2) Provinsi, 1) Menjabarkan Pedoman/Petunjuk UP2K-PKK. 2) Melakukan pembinaan, pemantauan dan pengendalian. 3) Mencarikan donator dalam penambahan modal kelompok.
3) Kabupaten/Kota, 1) Menjabarkan Pedoman Umum dan Teknis. 2) Melakukan pembinaan, pemantauan dan pengendalian. 3) Mencarikan donator dalam penambahan modal kelompok.
4) Kecamatan, 1) Menjabarkan Pedoman Umum dan Teknis. 2) Melakukan pembinaan, pemantauan dan pengendalian. 3) Mencarikan donator dalam penambahan modal kelompok.

5) Desa/Kelurahan,1) Membimbing dan membina kelompok UP2K-PKK. 2) Melakukan pembinaan, pemantauan dan pengendalian. 3) Mencarikan donator dalam penambahan modal kelompok (Putri, 2018).

2.4.5 Pembinanan UP2K-PKK

1. Pembinaan Umum

   Pembinaan secara umum dilakukan oleh instansi/lembaga terkait dan Tim Penggerak PKK Pusat yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa.

2. Pembinaan Teknis

   Pembinaan Teknis kelompok UP2K-PKK dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari Provinsi sampai Desa/Kelurahan oleh SKPD terkait dan Tim Penggerak PKK yang dikoordinasikan oleh Badan/ Dinas/ Kantor Pemberdayaan Masyarakat (Reno, 2019).

2.5 Pemberdayaan Perempuan

2.5.1 Pengertian Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan Perempuan adalah usaha sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Pemberdayaan perempuan “sebagai sumber daya insani, potensi yang dimiliki perempuan dalam hal kuantitas maupun kualitas tidak dibawah laki-laki”. Namun kenyataannya masih dijumpai bahwa status perempuan dan peranan perempuan dalam masyarakat masih bersifat subordinatif dan belum sebagai mitra sejajar dengan laki-laki (Amelia, 2019).

Oleh karena itu untuk meningkatkan kualitas hidup atau kesejahteraan bagi perempuan dapat dilakukan dengan cara memberdayakan kaum perempuan yang lemah dan menciptakan hubungan yang adil, setara antara laki-laki dan perempuan, serta mengikutsertakan perempuan pada proses pengambilan keputusan. Pemberdayaan Perempuan dapat dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan praktis, yaitu dengan pendidikan, kesehatan, ekonomi baik perempuan maupun laki-laki. Dan melalui pemenuhan kebutuhan strategis, yaitu dengan melibatkan perempuan dalam kegiatan pembangunan.

2.5.2 Tahapan Pemberdayaan Perempuan

Ada beberapa tahapan dalam proses pemeberdayaa yaitu sebagai berikut :

1. Seleksi lokasi/wilayah

   Seleksi wilayah dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh lembaga, pihak-pihak terkait dan msayarakat. Penentapan kreteria penting agar pemilihan lokasi dilakukan sebaik mungkin, sehingga tujuan pemberdayaan akan tercapai seperti yang diharapkan.

2. Sosialisasi pemberdayaan masyarakat

   Sosialisasi, merupakan upaya mengkomunikasikan kegiatan untuk penciptaan dialog dengan masyarakat. Melalui sosialisasi akan memebantu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pihak terkait tentang program dan atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah direncanakan, proses sosialisasi menjadi sangat penting, karena akan menentukan minat atau ketertarikan masyarakat untuk berpartisipasi (berperan dan terlibat) dalam program pemberdayaan masyarakat yang dikomunikasikan.

3. Proses pemberdayaan masyarakat

   Hakikat pemberdayaan adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya.

4. Pemandirian masyarakat yang tradisional

   Berpegang pada prinsip pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk memandirikan masyarakat dan meningkatkan taraf hidupnya, maka arah pemandirian masyarakat adalah berupa pendampingan untuk menyiapkan masyarakat agar benra-benar mampu mengelola sendiri kegiatanya (Amelia, 2019).

Dalam operasionalnya inisiatif tim pemberdayaan masyarakat secara perlahan akan dikurangi dan akhirnya berhenti. Peran tim fasilitator akan dipenuhi oleh pengurus kelompok atau pihak lain yang dianggap mampu oleh masyarakat. Berdasarkan tahapan pemberdayaan tersebut maka penulis akan menggunakanya dalam analisis terhadap Fungsi UP2K yang dibina oleh PKK.

2.5.3 Tujuan Pemberdayaan Perempuan

Secara mendasar Suharto tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang tidak punya keberdayaan baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri) maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas karena struktur sosial yang tidak adil). Secara lebih rinci menurut Daulay dalam (Reno, 2019), menekankan bahwa tujuan dari upaya pemberdayaan perempuan adalah terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara.

Tujuan dari pemberdayaan perempuan itu sendiri apabila dijabarkan adalah meningkatkan kualitas hidup perempuan dalam berbagai bidang strategis,

penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan, penegakan hak asasi manusia (HAM) perempuan. Berdasarkan pendapat beberapa ahli tentang tujuan pemberdayaan perempuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemberdayaan perempuan adalah upaya yang dilakukan kepada para perempuan untuk meningkatkan harkat dan martabat kaum perempuan agar dapat hidup mandiri dan dapat disetarakan dengan kaum laki-laki karena memiliki hak serta potensi yang sama (Reno, 2019).

2.5.4 Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan dilakukan untuk menunjang dan mempercepat tercapainya kualitas hidup dan mitra kesejajaran antara laki-laki dan perempuan yang bergerak dalam seluruh bidang atau sektor. Keberhasilan pemberdayaan perempuan menjadi cita-cita semua orang. Namun untuk mengetahui keberhasilan sebagai sebuah proses, dapat dilihat dari indikator pencapaian keberhasilannya, Suharto (2010) Adapun indikator pemberdayaan perempuan adalah sebagai berikut:

1) Adanya sarana yang memadai guna mendukung perempuan untuk menempuh pendidikan semaksimal mungkin.
2) Adanya peningkatan partisipasi dan semangat kaum perempuan untuk berusaha memperoleh dan mendapatkan pendidikan dan pengajaran bagi diri mereka.
3) Meningkatnya jumlah perempuan mencapai jenjang pendidikan tinggi, sehingga dengan demikian, perempuan mempunyai peluang semakin besar dalam mengembangkan karier sebagaimana halnya laki-laki.

4) Adanya peningkatan jumlah perempuan dalam lembaga legislatif, eksekutif dan pemerintahan.
5) Peningkatan keterlibatan aktifis perempuan dalam kampanye
6) pemberdayaan pendidikan terhadap perempuan. Namun lebih dari itu semua adalah terciptanya pola pikir dan paradigma yang egaliter.

Perempuan juga harus dapat berperan aktif dalam beberapa kegiatan yang memang proporsinya. Jikalau ini semua telah terealisasi, maka perempuan benar-benar telah terberdayakan Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemberdayaan perempuan yang dilakukan harus tepat sasaran. Sumodiningrat dalam Nugroho (2011), menjelaskan bahwa sasaran keberhasilannya adalah :

1. Meningkatnya pendapatan perempuan di tingkat bawah dan menurunnya jumlah penduduk yang terdapat di bawah garis kemiskinan.
2. Berkembangnya kapasitas perempuan untuk meningkatkan kegiatan sosial ekonomi produktif keluarga.
3. Berkembangnya kemampuan perempuan dan meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat, baik aparatur maupun warga.

2.6 Kerangka Teori

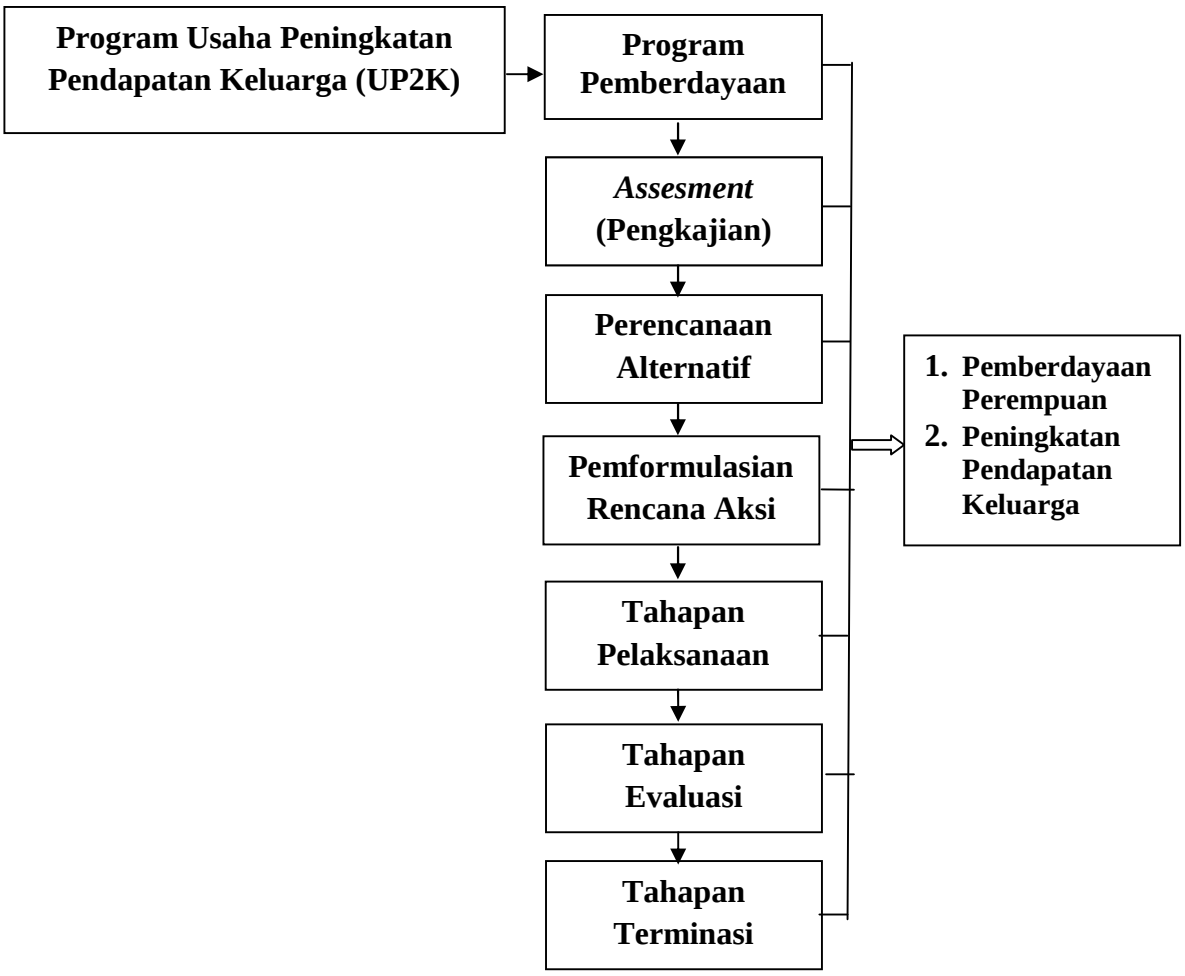

Gambar 2.1:
Kerangka Teori
Sumber: Isbandi Rukminto Adi (2010)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor (Moloeng, 2012) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Lebih lanjut Moleong (2012) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif menekankan pada data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

Penelitian kuallitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Sedangkan tipe penelitian ini menggunakan tipe deskriptif kualitatif, dimana peneliti mendeskripsikan wawancara mendalam terhadap subjek penelitian. Dengan dasar tersebut, maka penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan tentang Analisis program usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) dalam pemberdayaan perempuan di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat.

Melalui pemilihan rancangan deskriptif kualitatif, maka penulis akan melakukan pendekatan terhadap dan obyek penelitian dengan menggali informasi sesuai dengan persepsi penulis dan informan dapat berkembang sesuai dengan interaksi yang terjadi dalam proses wawancara. Penulis senantiasa

menginterpretasikan makna yang tersurat dan tersirat dari penjelasan yang diberikan informan, hasil observasi lapangan serta catatan pribadi.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian telah dilaksanakan di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat.

3.3 Informan

Menurut Moleong (2012), informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang suatu situasi dan kondisi latar penelitian. Seorang informan adalah sumber data yang dibutuhkan oleh penulis dalam sebuah penelitian. Sedangkan menurut Sugiyono (2012), informan adalah: "Orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi ataupun fakta dari suatu objek penelitian".

Untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan permasalahan penelitian, dimana terlebih dahulu penulis menetapkan siapa saja informannya dan kemudian mendelegasikan tugas dibidangnya yang sesuai dengan tema penelitian. Dalam penelitian ini, penentuan informan diperoleh dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*, dan yang menjadi *informan*nya adalah:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No.	Informan	Umur	Keterangan
1.	Dra. Maimanah, MA	53 Tahun	Camat Kecamatan Bubon
2.	Cut Suryani	53 Tahun	Sekretaris PKK Kecamatan Bubon
3.	Siti Amran, S.Pd	47 Tahun	Ketua Pokja II PKK Kecamatan Bubon
4.	Ani	34 Tahun	Ketua PKK Gampong Layung
5.	Juwaini	38 Tahun	Ketua PKK Gampong Seumuleng
6.	Siti Hasanah	26 Tahun	Ketua PKK Gampong Blang Sibeutong
7	Nursalami	46 Tahun	Ketua Kelompok UP2K

8	Herna Aida	48 Tahun	Wakil Ketua kelompok UP2K
9	Kurata Aini	33 Tahun	Anggota kelompok UP2K
10	Eka Yulidar S.Pd.I	34 Tahun	Masyarakat
11	Cut Intan	49 Tahun	Masyarakat
Jumlah			11 orang

3.4 Sumber Data

Yang dimaksud sumber data adalah subyek darimana dapat diperoleh. Jadi sumber data menunjukkan asal informasi (Moleong, 2012). Data ini harus diperoleh dari sumber data yang tepat, supaya data yang terkumpul menjadi relevan dengan masalah yang diteliti.

a. Data Primer

Adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Untuk mendapatkan hasil data primer penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, seperti:

1. Wawancara

   Wawancara adalah percakapan, yaitu percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara *(interviewer)* yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai *(interviewer)* yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut, Moleong (2012). Wawancara biasanya dilakukan kepada sejumlah responden/informan yang jumlahnya relatif terbatas dan memungkinkan bagi peneliti untuk mengadakan kontak langsung secara berulang-berulang sesuai dengan keperluan.

2. Dokumentasi

   Dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan "*content analysis*" (Moleong, 2012). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memperoleh data-

data langsung dari lapangan, serta data-data dokumen atau arsip-arsip dari instansi terkait seperti data atau dokumentasi di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat.

b. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh baik yang belum diolah maupun telah diolah, baik dalam bentuk angka maupun uraian. Dalam penelitian ini data-data sekunder yang diperlukan antara lain literatur yang relevan dengan judul seperti buku-buku, artikel, makalah, peraturan-peraturan, struktur organisasi, petunjuk teknis dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.5.1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber atau informan (Muhadi, 2011). Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori semi struktur, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.

3.5.2. Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode dalam pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen atau catatan-catatan (Muhadi, 2011). Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam

penelitian kualitatif. Hasil penelitian akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik yang relevan dengan penelitian. Akan tetapi perlu dicermati bahwa tidak semua dokumen memiliki kredibilitas yang tinggi.

Dalam penelitian ini, studi dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan mengumpulkan data melalui sumber-sumber tertulis misalnya dokumen-dokumen resmi, makalah-makalah penelitian dan buku-buku yang relevan dengan penelitian ini. Studi dokumen resmi yang dilakukan peneliti adalah mengumpulkan data melalui pencatatan atau data-data tertulis mengenai analisis program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) dalam pemberdayaan perempuan di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat.

3.6 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat pengumpulan data, penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui obervasi dan wawancara (Sugiyono, 2012).

Pengggunaan peneliti sebagai instrumen penelitian dimaksudkan untuk mendapatkan kata-kata yang valid dan *realible*. Namun, untuk membantu kelancaran dalam melaksanakannya, peneliti juga didukung oleh instrumen pembantu sebagai panduan wawancara. Oleh karena itu, sebelum turun ke lapangan maka peneliti akan membuat terlebih dahulu panduan wawancara untuk memudahkan pelaksanaan penelitian di lapangan. Alat bantu yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dokumen, laporan-laporan dan lain sebagainya.

3.7 Teknik Analisis Data

Prinsip utama dalam analisa data adalah bagaimana menjadikan data atau informasi yang telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk uraian dan sekaligus memberikan makna atau interprestasi sehingga informasi tersebut memiliki signifikan ilmiah atau teoritis. Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Bikken dalam Moleong (2012) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisa data ini menguraikan, menafsirkan dan menggambarkan data yang terkumpul secara sistemik dan sistematik. Kegiatan pengumpulan data dan analisis data tidak dapat dipisahkan. Pengumpulan data ditempatkan sebagai komponen yang merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Analisis data pada dasarnya sudah dilakukan sejak awal kegiatan penelitian sampai akhir penelitian.

Dalam model ini kegiatan analisis dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.

1. Tahap reduksi data

   Reduksi data yaitu proses pemilihan data kasar dan masih mentah yang berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung melalui tahapan pembuatan ringkasan, memberi kode, menelusuri tema, dan menyusun ringkasan. Tahap reduksi data yang dilakukan penulis adalah

menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan mengenai analisis program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) dalam pemberdayaan perempuan di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat, kemudian memilah-milahnya ke dalam kategori tertentu.

2. Tahap penyajian data

   Seperangkat hasil reduksi data kemudian diorganisasikan ke dalam bentuk matriks (*display data*) sehingga terlihat gambarannya secara lebih utuh. Penyajian data dilakukan dengan cara penyampaian informasi berdasarkan data yang dimiliki dan disusun secara runtut dan baik dalam bentuk naratif, sehingga mudah dipahami. Dalam tahap ini peneliti membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis sehingga tema sentral yaitu analisis program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) dalam pemberdayaan perempuan di Kecamatan Bubon dapat diketahui dengan mudah.

3. Tahap Verifikasi data/penarikan simpulan

   Verifikasi data penelitian yaitu menarik simpulan berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian peneliti mengambil simpulan yang bersifat sementara sambil mencari data pendukung atau menolak simpulan. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengkajian tentang simpulan yang telah diambil dengan data pembanding teori tertentu. Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat kebenaran hasil analisis yang melahirkan simpulan yang dapat dipercaya.

3.8 Pengujian Kredibilitas Data

Rencana pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji Kredibilitas atau pengujian kepercayaan data. Pengujian kredibilitas data hasil penelitian menurut Sugiyono (2012) dilakukan dengan perpanjangan pengamatan. peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat. analisis kasus negatif dan member cek. Dalam penelitian ini uji kredibilitas yang dipilih diantaranya triangulasi.

Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dan berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yangberbeda (Sugiyono, 2012).

3.9 Jadwal Penelitian

Jadwal beserta rangkaian kegiatan dalam melaksanakan penelitian ini dimulai dari bimbingan, pelaksanaan seminar proposal, perbaikan proposal sampai ujian sidang skripsi. Berikut tabel jadwal dan rangkaian pelaksanaan penelitian ini:

Tabel 3.2: Jadwal Penelitian

No.	KEGIATAN	Bulan Ke-					
		I	II	III	IV	V	VI
I	Persiapan Penelitian						
II	Pengumpulan data sekunder						
	Pembuatan proposal						
	Konsultasi						
	Perbaikan						
	Seminar proposal						
	Perbaikan						
III	Penelitian lapangan						
	Pengolahan data						
	Analisis data						
IV	Penulisan laporan						
	Konsultasi						
	Seminar hasil						
	Perbaikan						
	Sidang konprehensif						
	Sidang akhir						

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Bubon adalah salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh. Kecamatan yang mempunyai luas 129,58 Km^2 ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 7.786 jiwa yang tersebar dalam 3 Mukim serta 17 Desa/Gampong. Kecamatan Bubon memposisikan Gampong Banda Layung sebagai Ibukota Kecamatan. Kecamatan ini mempunyai batas-batas wilayah, antara lain: Utara berbatasan dengan Kecamatan Woyla, Selatan berbatasan dengan Samatiga, Barat berbatasan dengan Kecamatan Arongan Lambalek, dan Timur berbatasan dengan Kaway XVI. Adapun peta wilayah kecamatan Bubon dapat dilihat sebagai berikut:

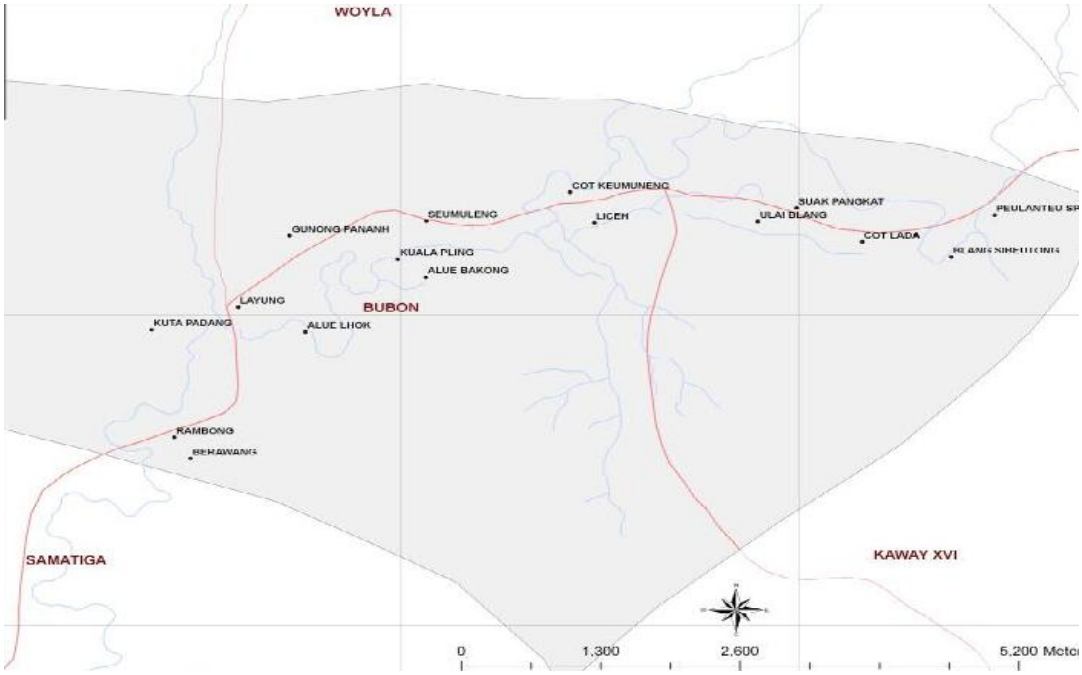

Gambar 4.1: Peta Wilayah Kecamatan Bubon

4.2. Gambaran Umum PKK Kecamatan Bubon

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai gerakan pembangunan masyarakat bermula dari seminar Home Economic di Bogor tahun 1957. Sebagai tindak lanjut dari seminar tersebut, pada tahun 1961 panitia penyusunan tata susunan pelajaran pada Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kementerian Pendidikan bersama kementerian-kementerian lainnya menyusun 10 segi kehidupan keluarga. Gerakan PKK dimasyarakatkan berawal dari kepedulian istri gubernur Jawa Tengah pada tahun 1967 (ibu Isriati Moenadi) setelah melihat keadaan masyarakat yang menderita busung lapar.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui 10 program pokok keluarga dengan membentuk Tim Penggerak PKK disemua tingkatan, yang keanggotaan timnya secara relawan dan terdiri dari tokoh/pemuka masyarakat, para isteri kepala dinas/jawatan dan isteri kepala daerah s.d tingkat desa dan kelurahan yang kegiatannya didukung dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pada tanggal 27 Desember 1972 Mendagri mengeluarkan Surat Kawat No. SUS 3/6/12 yang menyatakan bahwa pendidikan dalam PKK dirubah menjadi pembinaan dan dilaksanakan diseluruh Indonesia, selanjutnya tanggal 27 Desember ditetapkan sebagai hari Kesatuan Gerakan PKK. Dalam era reformasi dan ditetapkannya TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN 1999-2004, serta pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan undang-undang No.22 tahun 1999 dan undang-undang No.25 tahun 1999, tetapi PKK pusat tanggap dengan mengadakan penyesuaian-penyesuaian yang disepakati dalam rakernaslub PKK tanggal 31 Oktober-02 November 2000 di Bandung dan hasilnya merupakan dasar dalam

perumusan keputusan menteri dalam negeri dan otonomi daerah No. 53 tahun 2000, yang selanjutnya dijabarkan dalam pedoman umum gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ini. Hal yang mendasar antara lain adalah perubahan nama gerakan PKK dari gerakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga menjadi gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

1. Visi dan Misi Pemberdayaan Kesejahteraan keluarga (PKK)
   a. Visi pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK)

      Terwujudnya keluarga beriman yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju, mandiri berkesetaraan dan berkeadilan gender serta berkesadaran hukum dan lingkungan.
   b. Misi pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK)
      1) Meningkatnya mental spiritual, perilaku hidup dengan menghayati dan mengamalkan pancasila serta meningkatkan pelaksanaan dan kewajiban dengan kewajibandengan hak asasi manusia (HAM), demokrasi, meningkatkan kesetiakawanan sosial dan kegotong-royongan serta pembentukan watak bangsa yang selaras, serasi, seimbang.
      2) Meningkatkan pendidikan dan keterampilan yang diperlukan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan pendapatan keluarga.
      3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengan keluarga, serta peningkatan pemanfaatan pekarangan, sandang dan penataan perumahan serta tata laksana rumah tangga yang sehat.

4) Meningkatkan derajat kesehatan, kelestarian lingkungan hidup serta membisakan hidup berencana dalam semua aspek kehidupannya dan perencanaan ekonomi keluarga dengan membiasakan menabung.
5) Meningkatkan pengelolaan gerakan PKK baik kegiatan perorganisasian maupun pelaksanaan program-programnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat

2. Struktur Organisasi PKK Kecamatan Bubon

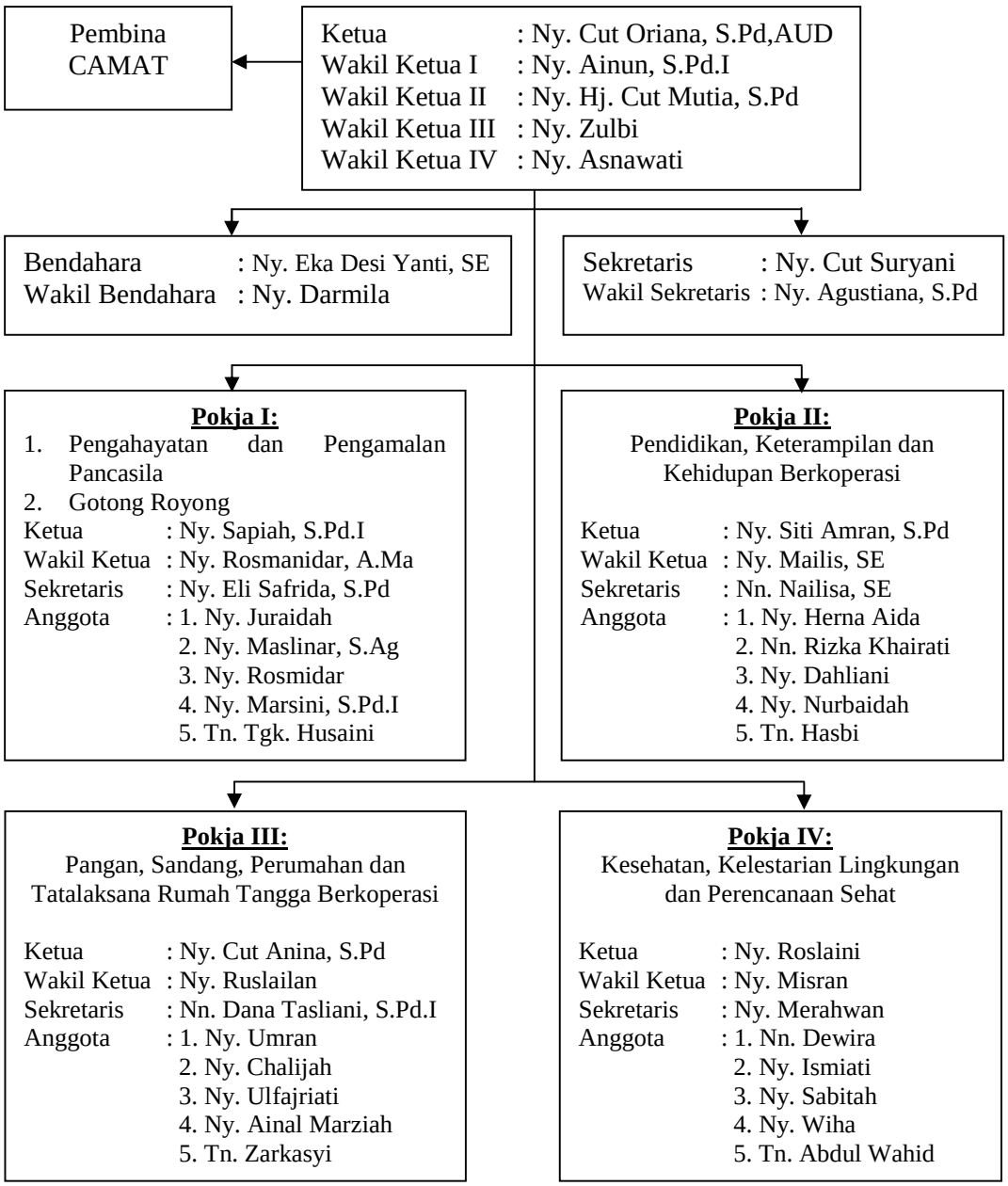

Gambar 4.2: Struktur Pengurus PKK Kecamatan Bubon Tahun 2021

Tenaga pengurus PKK Kecamatan Bubon rata-rata berpendidikan S-1, dalam melaksanakan suatu kegiatan terdapat penanggung jawab dalam setiap divisi program yang sudah ditentukan tugas dan kewajibannya. Kerjasama yang kompak dibutuhkan dalam PKK agar tujuan dari kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar dan tercapai maksud tujuannya. Tim Penggerak PKK Kecamatan Bubon sebagian besar telah memiliki pekerjaan di luar pengurusan PKK, namun mereka memiliki komitmen dan tanggung jawab yang besar untuk memberdayakan masyarakat khusunya perempuan di Kecamatan Bubon melalui PKK sehingga kehidupan masyarakat semakin sejahtera, dapat memperoleh hasil dari keterampilan yang diadakan oleh PKK sehingga dapat memperoleh tambahan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Upaya Kecamatan Bubon dalam mengatasi kemiskinan adalah dengan melakukan pemberian bantuan yang direalisasikan dalam bentuk bantuan pemberian modal untuk usaha terkhusus kaum perempuan dan masyarakat miskin atau kurang mampu, yang dinamakan usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K), hanya untuk masyarakat terkhusus perempuan yang sudah memiliki usaha dan mengembangkan usahanya dan benar-benar dianggap berhak menerimanya.

Dana penguatan modal usaha bagi pembangunan terkusus pembangunan perempuan di Kecamatan Bubon bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi dan APBD kota. Dana ini dikelola oleh tim penggerak PKK Kelurahan yang digulirkan kepada kelompok-kelompok UP2K di gampong yang bersangkutan.

4.3. Hasil Penelitian

4.3.1 Implementasi program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) dalam pemberdayaan perempuan di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat

a. Tahapan *Assesment*

Salah satu faktor pendukung tercapainya tujuan suatu program adalah pelaksanaanya. Apabila pelaksanaan suatu program baik dan tepat sasaran maka program itu akan dapat memberikan dampak bagi masyarakat. Adapun pelaksanaan program UP2K di Kecamatan Bubon dimulai sejak tahun 2019 seperti yang disampaikan oleh Ibu Cut Suryani selaku Sekretaris PKK Kecamatan Bubon yang mengatakan bahwa:

> "UP2K berdiri dari PKK, program UP2K memang sudah ada sejak 2019 dan sudah terbentuk cuma belum di SK kan dan baru di SK kan pada tahun 2021. UP2K memang sudah lama ada, cuma tidak dibina, tidak dibimbing dan tidak diberi arahan. Tapi mulai dari 2019 hingga sekarang, Alhamdulillah sudah berjalan dan sangat memberikan dampak positif kepada masyarakat" (Hasil Wawancara tanggal 21 Juni 2021).

Kelompok UP2K di Kecamatan Bubon dimulai sejak tahun 2019 yang di bentuk setelah mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial, hal ini dapat diketahui dari hasil kutipan wawancara dengan pengurus PKK Kecamatan Bubon, yaitu Ibu Siti Amran yang menjabat sebagai ketua Pokja II, yang mengatakan bahwa:

> "UP2K di kecamatan Bubon dulu dapat kita bilang tidak berkembang, tetapi kalau sekarang sudah mulai berkembang. Kelompok UP2K sudah terbentuk, baru di bentuk setelah mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial jadi sekarang sudah di bentuk sebelumnya tidak di bentuk. Dananya dari Dinas Sosial kalau dari kecamatan tidak ada dan memang sudah berjalan sampai sekarang" (Hasil Wawancara tanggal 23 Juni 2021).

Adapun tujuan dari program UP2K di kecamatan Bubon, menurut pernyataan dari Cut Suryani adalah:

> “Tujuan dari program UP2K di Kecamatan Bubon adalah untuk membina dan mengembangkan usaha masyarakat yang tergabung dalam kelompok UP2K-PKK, sehingga dapat membantu masyarakat yang rendah ekonomi dan dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Memfasilitasi masyarakat yang dalam hal ini berupa pemberian modal atau dana penguat modal usaha yang diberikan kepada anggota untuk mengembangkan usahanya sehingga masyarakat bisa berkembang secara mandiri. Dan program UP2K di Kecamatan Bubon sudah tercapai cuma belum maksimal 100%” (Hasil Wawancara tanggal 21 Juni 2021).

Berdasarkan dari kutipan wawancara tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa latar belakang program UP2K di Kecamatan Bubon di bentuk tahun 2019 atas bantuan dari program PKK selanjutnya diberikan oleh Dinas Sosial. Adapun tujuan dari program UP2K di Kecamatan Bubon adalah untuk memfasilitasi masyarakat yang dalam hal ini berupa kegiatan pemberian modal usaha yang diberikan kepada anggota untuk mengembangkan usahanya sehingga masyarakat bisa berkembang secara mandiri dan dapat membantu masyarakat yang rendah ekonomi dan dapat meningkatkan pendapatan keluarga.

b. Perencanaan Alternatif

Program UP2K ini merupakan program lanjutan dari PKK. Oleh karenanya pada tahap pelaksanaannya sedikit berbeda dengan sebelumnya. Berangkat dari masalah-masalah dan potensi pada sumber daya manusia yang ditemukan, maka upaya pemecahan masalah yang dilakukan masyarakat dan pihak pemerintah setempat dengan mengusulkan ide-ide kegiatan yang membantu meningkatkan perekonomian keluarga, dimana ide tersebut menjadi sebuah solusi dari permasalahan yang terjadi di Kecamatan Bubon. Alternatif pemecahan masalahnya dengan mengaktifkan kembali program UP2K, diadakan kembali kegiatan salah satunya pelatihan dan mengembangkan skill yang dimiliki ibu-ibu

anggota PKK. Sebagaimana yang diutarakan oelh Ibu Cut Suryani sebagai berikut:

> "Karena disini sebagian ibu-ibu hanya bekerja mengurus rumah tangga, maka dari pihak kecamatan mengusulkan ide-ide untuk program supaya ibu-ibu terbantu dalam segi perekonomian keluarga, jadi tidak hanya diam dirumah. Kegiatan UP2K melalui PKK diadakan pelatihan tentang pembuatan kue tradisional, menjahit, pembuatan tikar anyaman untuk usaha tani dan pelatihan pembuatan tas rajut dari barang bekas" (Hasil Wawancara tanggal 21 Juni 2021).

Adapun hasil wawancara peneliti dengan salah seorang pengurus PKK gampong Layung, yaitu Ibu Ani mengatakan bahwa:

> "Tahun 2019 yang lalu program UP2K ini sudah diperkenalkan oleh PKK Kecamatan, namun tidak terlalu fokus di program tersebut. Karena masih ada beberapa kendala, terutama sekali tentang pendanaan. Namun untuk program ini sekarang sudah mulai digalakkan kembali, dan ini memberi harapan baru kepada ibu-ibu rumah tangga yang mau membantu perekonomian keluarganya. Sebelum program UP2K ini diperkenalkan kembali, pengurus PKK desa mempertanyakan kepada seluruh anggota PKK di gampong untuk memilih usaha apa yang mau dikembangkan, dan pilihan masyarakat adalah pembuatan tikar anyaman untuk usaha tani, pembuatan kue tradisional, dan pelatihan tas rajut dari barang bekas" (Hasil Wawancara tanggal 25 Juni 2021).

Program UP2K masyarakat mendapatkan pembinaan dan pelatihan yang berguna untuk pengembangan usaha bagi kaum perempuan. Menurut pembina PKK dari Kecamatan, yaitu camat Bubon Ibu Maimanah mengatakan bahwa:

> "Pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan UP2K ini diantaranya kecamatan yang berfungsi sebagai monitoring, gampong yang berfungsi sebagai perantara program, perantara sosial, pemercepat perubahan sosial juga. Karena fungsi dari desa adalah sebagai perantara dan perencana, maka program ini tergantung pada inisiatif desa. Jika desa memiliki perencaan dan pelaksanaan yang bagus, maka percepatan perubahan sosial akan terjadi dengan cepat juga, begitu sebaliknya. Program UP2K ini merupakan program alternatif, dimana yang utamanya adalah pembinaan ibu-ibu rumah tangga dalam mensejahterakan keluarga, nah dalam UP2K dapat dibantu dalam penyelesaian masalah perekonomian keluarga, maka harus direncanakan dengan baik, tepat sasaran dan sebaiknya mencapai target yang diinginkan, yaitu mensejahterakan masyarakat" (Hasil Wawancara tanggal 21 Juni 2021).

Selanjutnya tentang bagaimana upaya UP2K dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Bubon, dapat diketahui dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu Maimanah, yang mengatakan:

> "Seperti yang sudah dibahas tadi, upaya UP2K ini adalah memberikan pelatihan dan pembinaan kepada ibu-ibu rumah tangga di gampong untuk menjalankan sebuah usaha. Setiap gampong memiliki potensi alam yang berbeda-beda, dan diusahakan dikembangkan dari potensi desa tersebut. Makanya sebelum dilakukan pendanaan dari UP2K ini, ibu-ibu ini diberikan pembinaan terlebih dahulu, seperti usaha pembuatan kue tradisional, pembuatan tas, tikar anyaman dan lain sebagainya. UP2K merupakan program bantuan dari pemerintah kepada masyarakat, khususnya kepada perempuan, melalui program PKK." (Hasil Wawancara tanggal 21 Juni 2021).

Desa merupakan ujung tombak dari program UP2K, hal ini disebabkan desa merupakan perencana dan pelaksana program UP2K. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Cut Suryani yang mengatakan bahwa:

> "Di sini pihak desa sangat membantu sekali. Selalu mendukung apa yang ingin dilakukan oleh kelompok PKK demi program UP2K. Desa selalu siap memfasilitasi pertemuan antara pihak PKK gampong dengan UP2K. Masyarakat yang berkecimpung dalam PKK gampong serta di usahakan mempunyai usaha dan masyarakat yang ekonomi keluarganya rendah sehingga dapat di angkat oleh pihak kecamatan untuk menjadi anggota program UP2K baik itu usaha kue atau usaha tani, kemudian pihak kecamatan membuat proposal bantuan untuk masing-masing anggota program UP2K untuk di usulkan ke Dinas Sosial. UP2K kecamatan Bubon membantu masyarakat untuk membentuk kelompok usaha kue UP2K dan kelompok tani UP2K, karena rata-rata mata pencaharian masyarakat kecamatan Bubon adalah petani dan menjual kue tradisional Aceh" (Hasil Wawancara tanggal 21 Juni 2021).

Berdasarkan dari kutipan wawancara tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam tahap perencanaan alternatif ini, peran dari gampong dan kecamatan memiliki peran yang sangat berpengaruh. Mengenai peran yang dilakukan oleh desa untuk program ini diantaranya mendata dan memetakan para pelaku usaha yang ingin berpartisipasi pada program, kemudian mendata dan

memetakan masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha dan selanjutnya mensosialisasikan program.

c. Tahap Pelaksanaan (Implementasi) Program

Setelah perencanaan sudah disepakati oleh gampong dan tim dari PKK Kecamatan, maka langsung dilaksanakan, sebelum dilaksanakan, terlebih dahulu pihak PKK kecamatan melakukan sosialisasi tentang program UP2K tersebut, hal ini disampaikan oleh Ibu Juwaini, yaitu pengurus PKK Gampong Seumuleng, yang mengatakan:

> "Ada, tapi bukan sosialiasi kepada masyarakat banyak cuma kepada orang-orang yang ada usaha saja. Disini memang kami menyaring untuk yang mendapatkan bantuan, karena kami juga melihat prospek dan juga seberapa butuhnya mereka terhadap perkembangan usahanya. Di gampong Seumuleng ada satu orang yang mendapat bantuan UP2K dari Dinas Sosial, dia memiliki usaha kue dan termasuk dalam anggota kelompok UP2K" (Hasil Wawancara tanggal 27 Juni 2021).

Ketua PKK Gampong Blang Sibeutong yang menjadi informan dalam penelitian ini berpendapat, untuk kegiatan sosialisasi tentang UP2K tidak pernah dilakukan oleh tim PKK Kecamatan, hal ini diketahui dari hasil kutipan wawancara dengan Ibu Siti Hasanah yang mengatakan bahwa:

> "Kegiatan sosialisasi tentang UP2K ini belum pernah dilakukan oleh pengurus tim PKK Kecamatan. Namun di gampong ini ada satu orang yang mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial melalui program UP2K, kebetulan usaha yang dijalaninya adalah usaha pembuat kue kering tradisional" (Hasil Wawancara tanggal 25 Juni 2021).

Kegiatan sosialisasi tentang program UP2K ini tidak semua gampong dan masyarakat yang mendapatkan sosialisasi tersebut. Pemerintah gampong menyaring terlebih dahulu untuk siapa-siapa saja yang pantas diajukan sebagai anggota UP2K. Kriteria untuk menjadi anggota UP2K adalah ibu rumah tangga yang memiliki usaha dirumah.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, diperkuat oleh penyataan dari Ibu Cut Suryani, yang mengatakan bahwa:

> "Untuk tahap pelaksanaan, biasanya langkah awal kami adalah terlebih dahulu mendata kembali usaha-usaha yang ada di desa. Kemudian sebelum kami berikan dana bantuan usaha, kami akan mengunjungi tempat usaha tersebut untuk melakukan wawancara dan memastikan usaha yang terdaftar itu benar-benar dilakukan. Jangan sampai kita memberikan dana untuk mengembangkan usaha, tapi usahanya tidak berjalan, adapun tujuan diadakannya pelatihan tersebut adalah agar menambah kemampuan masyarakat dalam mengolah bahan makanan atau bahan lainnya agar bisa menghasilkan uang". (Hasil Wawancara tanggal 21 Juni 2021).

Lebih lanjut, ibu Cut Suryani menjelaskan tentang apa saja program pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga yang telah dilaksanakan oleh UP2K PKK di Kecamatan Bubon adalah:

> "Pada 2018 program pemberdayaan yang telah dilaksanakan adalah menjahit, masyarakat di bimbing dan diberikan beberapa unit mesin jahit untuk kelompok menjahit supaya dapat membantu masyarakat dalam membuka usaha menjahit. Sedangkan 2019 dan 2020 program pemberdayaan yang dilakukan adalah kelompok usaha kue UP2K dan ada penambahan kelompok usaha tani UP2K pada 2020. Kelompok usaha tani UP2K tidak berjalan lancar karena tidak ada dana sedangkan kelompok usaha kue UP2K berjalan dengan lancar dan mendapatkan bantuan modal usaha sebanyak Rp.2.000.000,- dari Dinas Sosial untuk masing-masing anggota kelompok usaha kue UP2K" (Hasil Wawancara tanggal 21 Juni 2021).

Upaya UP2K dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Bubon, adalah dengan memberikan bantuan modal ke masyarakat yang membutuhkan, adapun tanggapan dari Ibu Kurata Aini selaku masyarakat tentang program UP2K ini adalah:

> "Saya mendapatkan bantuan dari UP2K ini sebesar Rp. 2.000.000,- dan ini saya manfaatkan untuk modal usaha kue. Sebelum saya mendapatkan bantuan tersebut saya di arahkan oleh PKK kecamatan" (Hasil Wawancara tanggal 26 Juni 2021).

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Herna Aida yang mengatkan bahwa:

> "Ada, cuma di kasih Rp. 2.000.000,- aja itupun harus kasih untuk orang camat Rp. 200.000,- dan juga potong Rp. 20.000,- lagi untuk uang kas, uang bersih berarti Rp. 1.800.000,- Kalau ada musrembang kuenya di ambil sama kami disitulah laba kue yang kami tarok di ketua kelompok, kuenya di ambil sama kami harga kuenya misalnya kue bhoi 800 rupiah sepotong. Modal bantuan ini di manfaatkan untuk modal usaha kue" (Hasil Wawancara tanggal 25 Juni 2021).

Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan dari Ibu Cut Intan, yang merupakan masyarakat yang menerima bantuan dari UP2K, yang menyampaikan :

> "Iya saya mendapatkan bantuan dari UP2K sebesar Rp. 2.000.000,- namun modal yang saya terima sebesar Rp. 1.800.000,-, katanya sih untuk kecamatan dan uang kas PKK". (Hasil Wawancara tanggal 27 Juni 2021).

Demikian juga yang disampaikan oleh Ibu Nursalami, yang mengatakan bahwa:

> "Saya termasuk anggota yang mendapatkan bantuan dari UP2K, namun bantuan modal tersebut, tidak semuanya kami dapatkan dengan penuh, dari Dinas Sosial diberikan Rp. 2.000.000,- namun ketika sampai di tangan kami hanya Rp. 1.800.000,-, katanya untuk kecamatan dan untuk kas PKK. Jujur saya katakan, hal ini agak berat untuk kami usaha kecil, karena bantuan itu sangat berharga untuk kami, tapi mau dibilang apa, karena sudah seperti itu aturannya". (Hasil Wawancara tanggal 28 Juni 2021).

Berdasarkan dari kutipan wawancara tersebut di atas, peneliti kembali mempertanyakan hal tersebut kepada Ibu Cut Suryani, yang mengatakan bahwa:

> "Dana yang keluar memang sebesar Rp. 2.000.000,-., ada pemotongan untuk pihak kecamatan sebesar Rp. 200.000,-, yaitu untuk biaya kepengurusan di Dinas Sosial atau biaya operasional pengurus UP2K dalam melakukan pendataan ke tiap-tiap desa, sedangkan dana Rp. 20.000,-, itu untuk kas PKK gampong yang diberikan setiap bulannya, yang nantinya akan bermanfaat untuk PKK gampong sendiri" (Hasil Wawancara tanggal 21 Juni 2021).

Modal usaha yang diberikan oleh UP2K di manfaatkan untuk modal usaha, namun modal tersebut harus di potong sebesar Rp. 200.000,- sehingga masyarakat hanya mendapatkan bantuan modal usaha tersebut sebesar Rp. 1.800.000,-.

Berdasarkan dari kutipan wawancara tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan program UP2K dilakukan melalui pelatihan atau pemberdayaan masyarakat. Adapun tujuan diadakannya pelatihan tersebut adalah agar menambah kemampuan masyarakat dalam mengolah bahan makanan atau bahan lainnya agar bisa menghasilkan uang.

Manfaat dari pemberdayaan ekonomi yang dilakukan UP2K juga dirasakan oleh ibu Kurata Aini, beliau bisa membantu suami dalam memenuhi kebutuhan dua orang anaknya dan kebutuhan sehari-hari. Ibu Herna Aida mengaku “Sudah dua kali mendapatkan modal dari UP2K untuk penambahan modal usaha kue tradisionalnya”. Seperti halnya ibu Herna Aida, ibu Nursalami juga merasakan hal yang sama, beliau mengaku “dari pemberdayaan yang dilakukan UP2K serta mendapatkan modal usaha untuk modal tambahan, dan sekarang bisa berjualan kue basah”.

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Maimanah yang mengatakan bahwa:

> “Program UP2K ini memang sangat membantu masyarakat, terutama bagi keluarga yang ekonominya rendah dengan adanya program UP2K ini sehingga ada perubahan dengan keadaan sebelumnya serta dapat meningkatkan pendapatan keluarga mereka” (Hasil Wawancara tanggal 21 Juni 2021).

Kesimpulan yang dapat peneliti ambil dari wawancara di atas adalah manfaat yang didapat dari adanya UP2K adalah bukan hanya dirasakan dari satu orang saja tetapi seluruh orang yang mengikuti program UP2K baik itu pelatihan maupun penambahan modal. Dengan hanya memberikan satu pealatihan tetapi

banyak orang yang merasakan manfaatnya. Tidak semua orang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, mengingatkan sekarang harga bahan pokok pada naik. Dalam hal ini masyarakat harus mampu menyesuaikan diri dalam situasi apapapun. Mampu menyesuaikan penghasilan dengan pendapatan. Dengan adanya pelatihan yang dilaksanakan oleh UP2K masyarakat dapat menyesuaikan kebutuhan pokok dengan kemampuannya dalam mengasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

d. Tahap Evaluasi Proses dan Hasil Perubahan

Tahap ini dilakukan untuk melihat proses dan hasil pelaksanaan kegiatan program. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memantau usaha yang diberikan modal tersebut berjalan atau tidak, hal ini disampaikan oleh Ibu Cut Suryani yang mengatakan bahwa:

> "Ada, memang saya sendiri yang pergi untuk melihat apakah usahanya masih berjalan atau tidak dan rata-rata dari kelompok usaha kue UP2K semuanya masih berjalan dengan lancar. Cuma kadang-kadang kalau saya suruh buat kue basah tapi yang ada cuma kue kering, disitu lah yang menjadi kendalanya. Mungkin itu semua karena dia banyak kerjaan atau sibuk sehingga tidak sempat untuk membuat kue ketika orang lagi perlu". (Hasil Wawancara tanggal 21 Juni 2021).

Sedangkan menurut Ibu Siti Amran mengatakan bahwa:

> "Untuk monitoring ini dilakukan setiap enam bulan sekali, kami melihat bagaimana perkembangan usaha yang dilakukannya, apakah masih berjalan atau tidak, jika masih berjalan, kami mempertanyakan apa kendala yang dihadapi dan apa yang bisa dicarikan solusinya. Kalau yang tidak berjalan, kami mempertanyakan juga apa kendala yang dihadapinya, dan kita berusaha untuk mencari solusinya". (Hasil Wawancara tanggal 23 Juni 2021).

Adapun cara pihak Kecamatan dalam mengevaluasi program UP2K tersebut, menurut Pernyataan Ibu Cut Suryani adalah:

> "Setelah pihak kecamatan menilai program UP2K, pihak kecamatan ingin usaha kue kelompok UP2K ini juga di ketahui di luar kecamatan tidak hanya di kecamatan sendiri saja tetapi karena terhambat dengan dana sehingga kelompok usaha kue UP2K tidak bisa membuat kue dengan jumlah yang banyak cukup untuk kecamatan saja. Terutama kue Aceh seperti kue karah, kue bhoi, kue seupet dan jenis kue lainnya. Kita memonitoring usaha kue ini enam bulan sekali, disini kita lihat juga pembukuannya apakah ada peningkatan omzet atau tidak. Dalam monitoring ini kami melibatkan pihak kecamatan, pengurus PKK kecamatan dan pengurus PKK gampong" (Hasil Wawancara tanggal 21 Juni 2021).

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa monitoring dilakukan pada enam bulan sekali. Kegiatan monitoring dilakukan untuk mengetahui kondisi usaha yang sedang dijalankan, apakah lancar atau tidak berjalan. Monitoring ini melibatkan pihak kecamatan, pengurus PKK kecamatan dan pengurus PKK gampong.

e. Tahap Terminasi

Tahap terminasi merupakan tahap dimana sebuah program diputus hubungannya secara formal dengan sebuah komunitas yang menjadi sasaran. Untuk program pemberdayaam, terminasi dilakukan karena komunitas tersebut sudah dianggap mandiri. Adapun kegiatan terminasi yang dilakukan oleh pihak PKK Kecamatan, menurut pernyataan dari Ibu Cur Suryani adalah:

> "Untuk pengenalan program UP2K ini pada periode 2018-2019, kami membuat pelatihan dan pengadaan barang, yaitu pertama pelatihan menjahit dan pengadaan mesin jahit dan yang kedua adalah pelatihan pembuatan kue tradisional. Akan tetapi pelatihan-pelatihan ini di danai dari gampong masing-masing, tergantung dari pendanaan yang disiapkan oleh pihak gampong. Namun pada tahun 2020 yang lalu, UP2K ini mendapat bantuan dari Dinas Sosial, untuk mensuport pelaku usaha-pelaku usaha yang kecil dan yang perlu dibina agar pendapatan masyarakat kecil bisa meningkat" (Hasil Wawancara tanggal 21 Juni 2021).

Sedangkan menurut pendapat dari Ibu Maimanah mengatakan bahwa:

> "Program UP2K ini adalah program yang positif untuk kesejahteraan masyarakat, dan ini masih berlanjut dan berkembang sampai sekarang. Malahan untuk tahun 2020 kemaren, Dinas Sosial mau memberikan bantuan dana untuk pelaku usaha mikro, karena untuk sekarang pemerintah lagi menggiatkan dan mengembangkan pelaku usaha mikro untuk mendongkrak perekonomian masyarakat" (Hasil Wawancara tanggal 21 Juni 2021).

Berdasarkan dari kutipan wawancara tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa tahap terminasi dari program UP2K di Kecamatan Bubon mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan pelaku usaha mikro (dalam penelitian ini adalah ibu-ibu rumah tangga yang memiliki usaha) yang disupport oleh pemerintah agar dapat mengembangkan usahanya.

Adapun harapan program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) terhadap masyarakat, menurut Ibu Cut Suryani adalah:

> "Harapan untuk masyarakat dengan adanya bantuan modal Rp. 2.000.000,- dari Dinas Sosial, masyarakat diharapkan usahanya semakin maju dan sukses serta dapat membantu meningkatkan pendapatan keluarga. Program UP2K di kecamatan Bubon menurut kami lihat sudah tercapai, Cuma kendalanya di dana, program UP2K memang tercapai Insya Allah dalam 1 (satu) gampong ada 5 atau 3 orang buat kue yang mahir tidak ada gampong yang tidak mahir dalam kelompok UP2K masalah kue" (Hasil Wawancara tanggal 21 Juni 2021).

Harapan dari Pembina PKK Kecamatan yaitu Ibu Maimanah mengatakan bahwa:

> "Harapan saya dari program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) terhadap masyarakat adalah agar masyarakat dapat memanfaatkan modal dan kesempatan yang sudah diberikan oleh pemerintah dan semoga dengan adanya program UP2K ini kesejahteraan rakyat semakin meningkat sehingga mengurangi angka kemiskinan" (Hasil Wawancara tanggal 21 Juni 2021).

Sedangkan harapan masyarakat dari program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), menurut penuturan dari Siti Amran adalah sebagai berikut:

> “Untuk kedepanya yang baik-baik lah ada perubahan dan dapat meningkat, memang sudah tercapai tetapi belum maksimal 100% karena belum terlalu lama. Masing-masing mendapatkan Rp.2.000.000,- untuk modal usaha Rp.1.800.000,- dan Rp.200.000,- lagi untuk pihak kecamatan. Dalam uang tersebut masing-masing anggota kelompok UP2K setiap bulannya wajib setor sebanyak 20.000 selaku anggota kelompok UP2K untuk simpanan jasa. Uang tersebut akan digunakan untuk kebersamaan kelompok, disitulah nanti kita lihat peningkatanya hasilnya akan di bagi sama lagi”. (Hasil Wawancara tanggal 23 Juni 2021).

Harapan lainnya yang muncul adalah yang disampaikan oleh Ibu Cut Intan yang mengatakan bahwa:

> “Semoga dengan adanya program UP2K ini, masyarakat dapat terbantu dan dapat ikut membantu dalam meningkatkan perekonomian keluarga. Namun saya sangat berharap, jika bantuan dari UP2K ini, bukan hanya difokuskan untuk ibu-ibu rumah tangga yang memiliki usaha kue saja, namun juga lebih luas lagi, dan kalau bisa kita masyarakat di bina untuk dibuat satu kelompok binaan dengan usaha yang dipelopori oleh Dinas Sosial, jadi tidak hanya pelaku usaha kue saja” (Hasil Wawancara tanggal 25 Juni 2021).

Hal senada juga disampaikan oleh Eka Yulidar yang mengatakan bahwa:

> “Harapan saya kedepan agar UP2K harus lebih selektif lagi dalam memilih anggora UP2K, dan yang benar-benar mau bekerja dan berdedikasi untuk kelompok yang dikelola. Semoga program UP2K ini bisa menjadi pelopor untuk pemberdayaan perempuan dalam rangka peningkatan perekonomian keluarga. Namun kalau bisa uang yang diberikan, jangan dipotong lagi untuk dana ini-itu, karena kita juga setiap bulannya harus menyetor untuk kas PKK gampong” (Hasil Wawancara tanggal 25 Juni 2021).

Berdasarkan dari kutipan wawancara tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa harapan masyarakat dari program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) di Kecamatan Bubon adalah agar UP2K lebih selektif dalam pemilihan anggota UP2K, agar UP2K menjadi pelopor dalam program pemberdayaan perempuan. Selanjutnya masyarakat berharap agar modal yang diberikan tidak ada pemotongan sampai 10%, agar modal yang diberikan tersebut dapat dipergunakan dengan maksimal.

4.3.2 Kendala dalam pelaksanaan program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) dalam pemberdayaan perempuan di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat.

Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) yang merupakan program yang berpihak kepada masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah sedang dan kebawah, prorgam ini pernah *vakum* satu tahun, lalu aktif kembali pada tahun 2019. Sejauh ini UP2K banyak memberikan dampak positif terhadap masyarakat di Kecamatan Bubon salah satunya terhadap ibu Nursalami, yang mengatakan bahwa:

> "Banyak ilmu yang didapat dari pelatihan yang diadakan UP2K. Beliau juga mengaku terbantu dengan adanya pemberian modal dari Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K). Dan saya sudah dua kali mendapatkan bantuan tersebut. Pertama pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.000.000,- selanjutnya pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 2.000.000.-" (Hasil Wawancara tanggal 25 Juni 2021).

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Kurata Aini yang mengatakan bahwa:

> "Program UP2K merupakan program yang harus ditingkatkan lagi oleh pemerintah karena bermanfaat dan sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian keluarga" (Hasil Wawancara tanggal 23 Juni 2021).

Demikian juga yang disampaikan oleh Ibu Herna Aida, Ibu Eka Yulidar dan ibu Cut Intan dengan pendapat yang sama, mengatakan bahwa program UP2K ini sangat bermanfaat dan membantu dalam peningkatan perekonomian keluarga.

Hasil kutipan wawancara tersebut di atas, juga diperkuta oleh pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Cut Suryani yang mengatakan bahwa:

> "Dampaknya bagus, dan ada perubahan. Pokoknya dari keluarga yang tidak mampu Insya Allah bisa makan 1 hari 3 kali dari makan 1 kali sehari, segitulah perubahan yang dapat kami lihat" (Hasil Wawancara tanggal 21 Juni 2021).

Berdasarkan dari hasil kutipan wawancara tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa pelaksaaan program UP2K berdampak dalam meningkatkan kesejateraan ekonomi masyarakat di Kecamatan Bubon, hal ini dapat dilihat dari terbantunya masyarakat kurang mampu dalam meningkatkan pendapatan keluarga, memberikan keahlian tambahan, yang mana keahlian tersebut bisa menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Kecamatan Bubon.

Adapun yang menjadi kendala dalam program UP2K di Kecamatan Bubon menurut Ibu Cut Suryani adalah:

> "Kendalanya adalah kalau dari pihak gampong tidak mau mendata real, tentang ibu-ibu rumah tangga yang menjadi sasaran UP2K ke pihak Kecamatan. Karena kalau pihak gampong memberikan data yang salah kepada tim PKK Kecamatan atau tidak tepat sasaran, maka hal ini akan menjadi hambatan. Hal ini pernah terjadi di tahun 2019, yang mana subjek yang diberikan adalah orang dari kalangan berada (mampu), dan ini minimbulkan polemik atau asumsi yang negatif dari kalangan masyarakat. Kendala selanjutnya adalah pendonasinya yang masih kurang. Selama ini kita hanya dibantu oleh Dinas Sosial untuk membantu dalam program UP2K ini, sementara dari desa masing-masing tidak ada serta kurangnya kooperatif anggora UP2K dalam memberitahu tentang penghasilan atau pendapatannya. Solusinya adalah di dana, kalau ada dana lancar kalau tidak ada dana tidak lancar. Kekurangannya atau hambatannya Cuma di dana, tidak tau mau di naikkan kemana, kemana-mana di tolak sebenarnya anggota UP2K mau tetapi hambatan yang paling utama itulah dana. Solusinya kalau ada dana gampang dilaksanakan." (Hasil Wawancara tanggal 21 Juni 2021).

Senada dengan yang disampaikan oleh Sekretaris PKK Kecamatan yaitu ibu Cut Suryani, menurut pendapat dari Ibu Maimanah adalah:

> "Kendala yang utama adalah di data yang diberikan oleh desa, kalau data tersebut tidak sesuai dengan sasaran UP2K, maka program ini pastinya tidak berjalan, karena pastinya muncul paradigma di masyarakat tentang program KKN untuk UP2K, padahal disini data yang didapat berasal data yang dikasih dari pihak gampong. Nah, untuk itu dari pihak PKK Kecamatan memang harus memverifikasi dengan betul orang-orang mana yang harus diberikan modal atau dibantu. Salah satu kekurangan dari program ini adalah tingkat pemberian modal yang

> tidak besar atau malah tidak mengalami perkembangan" (Hasil Wawancara tanggal 21 Juni 2021).

Berdasarkan dari kutipan wawancara tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kendala dalam program UP2K ini adalah dari pendataan dari gampong tentang anggota UP2K yang kurang tepat sasaran, masih kurangnya donatur yang mau mendanai untuk program UP2K, kurangnya kooperatif anggota UP2K dalam memberitahu tentang penghasilan atau pendapatannya dan tingkat pemberian modal yang tidak besar sehingga usaha kurang mengalami pekembangan.

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) dalam Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat

Dalam pemberdayaan masyarakat, masyarakatlah yang menjadi aktor dan penentu pembangunan. Dalam kaitan ini, usulan-usulan masyarakat merupakan dasar bagi program pembangunan lokal, regional, bahkan menjadi titik pijak bagi program nasional. Disini masyarakat difasilitasi untuk mengkaji keutuhan, masalah dan peluang pembangunan dan perikehidupan mereka sendiri. Selain itu mereka juga menemu-kenali solusi yang tepat dan mengakses sumber daya yang diperlukan, baik sumberdaya eksternal maupun sumber daya milik masyarakat itu sendiri.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Pasal 12 Ayat 3 yang berisi Program pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c berupa peningkatan ketahanan pangan Keluarga dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki sesuai kearifan lokal dan juga Pasal 12 Ayat 8 yang berisi Program pengembangan kehidupan berkoperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf h berupa penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya.

Penentuan/penetapan materi dalam suatu program pemberdayaan harus betul-betul memperhatikan aspirasi masyarakat sebagai sasaran kegiatan, tetapi dengan tetap memperhatikan potensi sumber daya yang dimiliki. Sumber daya yang dimaksud bukan hanya terkait dengan ketersediaan potensi sumber daya alam, tetapi juga sumber daya manusia, serta hal-hal yang sering dilakukan masyarakat, atau kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha dan aktivitas kehidupan lainnya, karena faktor-faktor inilah yang akan menjadi acuan bagi tim fasilitator/pendamping dalam memberdayakan masyarakat.

Program pengembangan PKK sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat dipedesaan nampaknya memberikan hasil yang lebih efektif. Karena dengan adanya penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya, setelah mengikuti pelatihan masyarakat dapat mengembangkan potensi yang dimiliki dengan melibatkan sumber daya alam yang ada didesa tersebut dan kemudian menghasilkan beberapa produk yang bernilai rupiah, hasilnya dijadikan simpan pinjam dikoperasi desa, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu.

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung dengan sumberdaya yang memadai dengan tujuan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Dalam penelitian yang telah dilakukan menurut penulis program dalam suatu kebijakam tersebut didukung oleh sumberdaya yang ada di desa tersebut.

5.1.1 Assesment (Pengkajian)

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) merupakan suatu aktivitas atau kegiatan ekonomi masyarakat di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat.

Pada awalnya kegiatan ini berjalan dengan pelan, namun antusiasme masyarakat dan kesadaran yang muncul akan pentingnya kegiatan usaha yang dapat dikerjakan di rumah (*home industry*) akan dapat membantu perekonomian masyarakat sendiri. Dalam mengatasi kemiskinan pemerintah Kabupaten Aceh Barat melakukan upaya pemberian bantuan yang direalisasikan dalam bentuk bantuan pemberian modal untuk usaha terkhusus kaum perempuan dan masyarakat miskin atau kurang mampu, yang dinamakan usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K), hanya untuk masyarakat terkhusus perempuan yang sudah memiliki usaha dan mengembangkan usahanya dan benar-benar dianggap berhak menerimanya.

Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) diiharapkan mampu meningkatkan kondisi ekonomi keluarga, yang dengannya akan memiliki kemampuan untuk meningkatkan kondisi kesehatan, pendidikan, dan keterampilan. Program-program tersebut dilakukan melalui peningkatan pemberdayaan keluarga dalam bidang usaha ekonomi produktif.

Salah satu program pembangunan yang berpihak kepada perempuan di kelurahan Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat adalah program usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K), yang mana pelaksanaannya melalui lembaga pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK). Beberapa hal yang mendorong agar terlaksananya program pembangunan dari aspek ekonomi ini adalah sebagai berikut:

a. Jumlah pengangguran semakin meningkat
b. Menurunnya daya beli masyarakat
c. Sumber permodalan jauh dari jangkauan usaha masyarakat

d. Sedikitnya pembinaan dan pelatihan usaha bagi pengusaha menengah ke bawah

e. Usaha masih dilakukan perorangan.

Adapun dasar hukum yang melindungi dan mendukung kegiatan usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K) adalah sebagai berikut:

a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

c. Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

d. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.

e. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

f. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

Proses kegiatan yang mendorong terus meningkatnya usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K) di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat adalah dengan dibentuknya kelompok pelaksana (POKLAK). Dan pada setiap kelompok pelaksana akan memproduksi berbeda-beda produk yang dihasilkan yang sesuai dengan sumber daya yang ada di daerah masing-masing kelompok pelaksana.

5.1.2 Perencanaan Alternatif

Peran kaum perempuan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi memang sangat penting untuk terus dikembangkan. Tak hanya pada tataran wanita karir

yang bekerja kantoran, para ibu rumah tangga juga memiliki peran yang sama, memajukan dan mendukung ekonomi keluarga.

Sebuah organisasi dengan semangat untuk memajukan peran perempuan dalam berbagai bidang pun didirikan. Tujuannya adalah memberikan ruang bagi perempuan, khususnya ibu rumah tangga untuk berkegiatan positif dengan dampak yang positif pula, yakni salah satunya pemberdayaan yang dilakukan oleh Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat. Adapun tahapan pemberdayaan perempuan yaitu:

a. Penyeleksian lokasi/wilayah

   Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat sebagai salah satu fungsi Usaha UP2K ialah di karenakan memang telah memiliki usaha yang berpotensi untuk di kembangkan, yaitu usaha mikro yang telah berdiri sejak tahun 2018. sehingga dalam memberdayakan akan lebih mudah karena masyarakat telah memiliki dasar keterampilan terutama pembuatan produk.

b. Sosialisasi pemberdayaan masyarakat

   Pada tahap ini dari UP2K mensosialisasikan terkait pemberdayaan yang akan dilakukan, yaitu berupa program-program yang di susun secara bersamaan oleh petugas lapangan dengan masyarakat yang tergabung dalam kelompok UP2K Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat. Adapun program yang telah di rencanakan terkait dengan peningkatan SDM dan peningkatan pendapatan keluarga.

c. Dalam sosialisasi ini dilakukan penyadaran kepada masyarakat yang menjadi anggota UP2K bahwa mereka memiliki skill yang bisa

dimanfaatkan untuk bidang usaha ekonomi yang produktif, dan menunbuhkan kemauan pada anggota kelompok untuk mrngikuti atau mengambil bagian dalam kegiatan pemberdayaan yang memberi manfaat.

Tahap perencanaan ini, peran gampong dan kelompok pemberdaya dan kesejahteraan keluarga (PKK) memiliki peran yang sangat berpengaruh. Mengenai peran yang dilakukan oleh gampong untuk program ini diantaranya mendata dan memetakan para pelaku usaha yang ingin berpartisipasi pada program, kemudian mendata dan memetakan masalah yang dihadapi oleh para pelaku usaha, dan mensosialisasikan program tersebut. Sistem bantuan yang diterapkan pada program UP2K ini bersifat bantuan dana hibah.

5.1.3 Tahapan Pelaksanaan

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat aktif dalam memberikan pelatihan-pelatihan terhadap anggotanya sebagai pemberdayaan masyarakat, hal ini selaras dengan tujuan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) Kecamatan Bubon point ke dua yaitu; meningkatkan pendidikan dan keterampilan yang diperlukan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan pendapatan keluarga.

Jumlah anggota UP2K di Kecamatan Bubon adalah 10 orang untuk kelompok usaha kue, dimana anggotanya terdiri dari perwakilan 7 gampong yang ada diwilayah Kecamatan Bubon. Adapun gampong tersebut adalah gampong Layung, Gampong Blang Sibeutong, Beurawang, Alue Lhok, Alue Bakong, Liceh, dan gampong Seumuleng. Jumlah dana yang disalurkan adalah sebesar Rp. 20.000.000,-, dengan pembagian Rp. 1.800.000,- perorang.

Adapun alur dari pelaksanaan penetapan anggaran UP2K dapat dilihat pada bagan berikut:

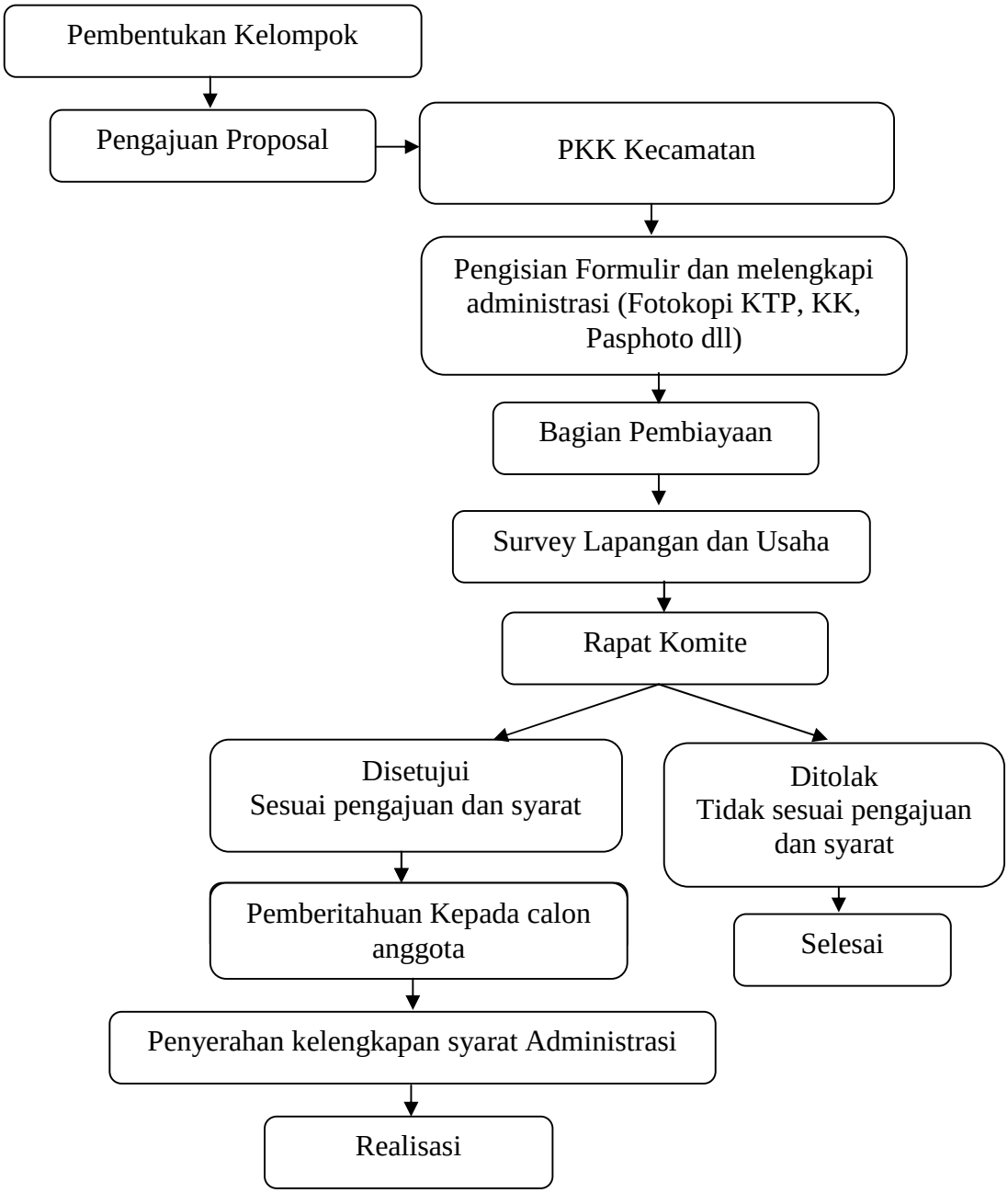

Gambar 5.1: Alur Pelaksanaan Realisasi Bantuan UP2K

Tahap pelaksanan berlanjut setelah tim dari PKK melakukan kunjungan ke tempat usaha adalah melakukan koordinasi. Untuk rapat koordinasi ini, biasanya kelompok tim dari PKK berkoordinasi dengan pihak gampong untuk memastikan

siapa-siapa saja yng menurut kelompok mendapatkan dana bantuan dari program UP2K. Pada tahap ini juga memperhitungan pelatihan yang dibutuhkan bagi para pengusaha rumahan. Tujuannya untuk mempercepat proses perubahan sosial yang diharapkan oleh para penanggungjawab. Pelatihan ini dilakukan bukan hanya sekali, hal ini disebabkan program ini merupakan bantuan dana dari pemerintah hanya sekali saja, untuk keberlanjutannya program ini diberikan kepada pelaksana program.

Setelah mendapatkan pelatihan, para ibu rumahtangga yang sudah terdaftar diberikan modal usaha, mengenai besaran modal usaha ini, sebesar RP. 1.800.000,-. Untuk pemberian modal usaha ini, tim PKK sangat berhati-hati, Karena pemberian modal usaha ini merupakan dana bantuan bukan dana pinjaman. Namun disetiap bulan anggota harus menyetor simpanan jasa sebesar Rp. 20.000,-

5.1.4 Tahapan Evaluasi

Pemantauan atau monitoring merupakan kegiatan evaluasi yang dilaksanakan pada kegiatan pelaksanaan program sedang dilakukan. Tahap monitoring dan evaluasi ini dimaksudkan untuk menghindari adanya keadaan kritis atau kendala yang terjadi yang akan menganggu pelaksanaan program. Monitoring dan evaluasi ini dilakukan Tim PKK kecamatan Bubon dengan melibatkan staf dari kecamatan Bubon, tim PKK Kecamatan Bubon dan pengurus PKK gampong. Pada proses pengawasan dan evaluasi ini sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga, karena dengan keterlibatan warga pada tahap ini dapat membentuk sistem masyarakat yang lebih mandiri.

Adapun cara monitoring dan evaluasi dilakukan pada saat rapat koordinasi. Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa monitoring dilakukan pada enam bulan sekali. Kegiatan monitoring dilakukan untuk mengetahui kondisi usaha yang sedang dijalankan, apakah lancar atau tidak berjalan. Monitoring ini melibatkan pihak kecamatan, pengurus PKK kecamatan dan pengurus PKK gampong. Proses monitoring dan evaluasi ini diharapkan dapat memberikan umpan balik yang berguna bagi perbaikan suatu program ataupun kegiatan. Evaluasi dan monitoring digunakan sebagai penilaian terhadap aktivitas atau mutu kegiatan.

5.1.5 Tahapan Terminasi

Pembinaan perempuan pada UP2K Kecamatan Bubon tidak terepas dari peran tim penggerak Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat pada tahapan pertamanya, selanjutnya pengelompokan unit usaha, pengajuan bantuan kepada Dinas Sosial, dan lain-lain, sampai pada proses produksi, penjualan dan inovasi produk. Dilihat dari proses pelaksanaannya, manfaat Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) Kecamatan Bubon adalah sama dengan tujuan program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K). Namun hal tersebut tidak terlepas dari peran penting dari tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK).

Tahap terminasi merupakan akhir pemberdayaan dimana sudah selesainya hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahapan ini pemutusan hubungan secara resmi oleh PKK Kecamatan Bubon juga belum dapat dilaksanakan sebagai lembaga penanggungjawab dari UP2K Kecamatan Bubon,

karena Kelompok UP2K di Kecamatan Bubon masih perlu pendampingan dan monitoring dari pihak kecamatan dalam usaha peningkatan pendapatan keluarga, terutama bagi keluarga yang kurang mampu.

Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) terdapat dua pelaksanaan program yang diterapkan. diantaranya ialah pendidikan dan keterampilan. Pada umumnya pendidikan dan keterampilan pada program ini adalah mengenai tumbuh kembang anak balita secara optimal sebagaimana melaksanakan dan mengembangkan kegiatan program Bina Keluarga Balita (BKB), namun peneliti mendapatkan bahwa program pendidikan dan keterampian diterapkan juga kepada wanita-wanita anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K).

UP2K Kecamatan Bubon memberikan sasaran perempuan karena menginginkan agar ibu-ibu rumah tangga miskin ini dapat mandiri serta dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan keluarha. Menjadikan perempuan berdaya serta menumbuhkan peran perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarha untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera merupakan salah satu tujuan dri PKK. Dalam program tersebut tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) memberikan pendidikan dan pelatihan (*training*) kepada ibu-ibu rumah tangga (anggota UP2K) berupa yaitu pelatihan berwirausaha pelatihan ini diberikan kepada para kelompok UP2K agar berwirausaha semakin maju dan bisa berinovasi ditengah persaingan, yang nantinya diharapkan mampu mandiri dan mampu mengelola usaha yang mereka jalankan kemudian pada kesejahteraan keluarga.

Pelatihan penyuluhan kualitas produksi, kualitas produksi memang harus ditingkatkan agar tetap bisa bertahan, tujuan dari peneliti ini ialah agar kelompok UP2K mampu menangani produk yang berkualitas dan bisa di terima konsumen, kualitas tidak hanya dari segi rasa namun segi kesehatan yaitu bahan-bahan yang digunakan dalam produksi apakah sudah berkualitas dan aman, hal ini juga sangat mempengaruhi kualitas produk jika kesehatan produk kita bagus maka akan menambah daya tarik produk yang kita jalankan, karena kecenderung konsumen saat ini ialah mencari makanan yang higenis dan baik bagi kesehatan. Pelatihan penentuan harga dan pemasaran produk, penentuan harga mungkin bagi pengusaha yang berpengalaman bukanlah suatu yang sulit, namun bagi pengusaha pemula seperti kelompok UP2K yang baru dibentuk mereka harus di hadapkan berbagi masalah nantinya, misalnya takut barangnya, tidak laku tidak ada yang membelinya sehingga keuntungan susah didapatkan.

Peningkatan partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan, tahap keempat ini para perempuan yang mengikuti program UP2K beberapa sudah ada yang menerima dana bantuan dari program UP2K untuk menambah modal usaha yang akan di jalani. Selama 1 sampai dua bulan mereka sudah dapat merasakan hasil keuntungan yang di dapatkan dari usaha yang di jalani walaupun sedikit.

5.2 Kendala dalam Pelaksanaan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) dalam Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat

Tujuan umum UP2K adalah “membina dan mengembangkan usaha keluarga yang tergabung dalam kelompok atau perorangan sehingga secara bertahap mampu menjadi wiraswasta serta memungkinkan timbulnya kegiatan yang koperatif”. Dalam proses untuk mencapai tujuan ini, tim penggerak PKK

mensosialisasikan terlebih dahulu tentang program pemberdayaan ekonomi keluarga dalam bentuk Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) yang kemudian dilakukan pembinaan berupa *training* dan pengembangan produk ke supermarket, toko atau warung sembako, dan tempat-tempat pemasaran lainnya.

Sedangkan proses untuk mencapai beberapa tujuan khusus UP2K Kecamatan Bubon adalah sebagai berikut:

1. Tentang permodalan. Maka dibentuklah lembaga keuangan gampong yang dapat memberikan bantuan penguatan modal usaha bagi UMKM termasuk untuk kegiatan UP2K. Jadi, dari masyarakat yang kurang mampu (miskin) yang memiliki usaha namun tidak berkembang, mereka dapat mengajukan bantuan kepada lembaga keuangan Gampong untuk penambahan modal usahanya.
2. Menciptakan peluang usaha baru, yakni dengan membentuk kelompok-kelompok usaha yang dapat dikerjakan oleh perempuan-perempuan (ibu rumah tangga) seperti: usaha kerajinan tangan, kerajinan yang dilatar belakangi oleh banyak nya sampah plastik yang bisa di daur ulang.
3. Menciptakan inovasi atau diversifikasi produk lokal. Proses yang terakhir ini adalah upaya untuk menghadapi persaingan produk-produk serupa, maka produk atau keanekaragaman produk dapat memberikan pilihan kepada konsumen. Salah satunya dengan memberikan produk baru misal dari segi rasa makanan.

Berdasarkan dari hasil penelitian ditemukan bahwa kendala dalam program UP2K ini adalah dari pendataan dari gampong tentang angggota UP2K yang kurang tepat sasaran, masih kurangnya donatur yang mau mendanai untuk

program UP2K dan tingkat pemodalan yang tidak besar sehinga usaha kurang mengalami pekembangan.

Apabila pelaksanaan suatu program baik dan tepat sasaran maka program itu akan dapat memberikan dampak bagi masyarakat. Program UP2K ini dijadikan sebagai suatu implementasi pemberdayaan perempuan, sehingga tercipta potensi, daya, dan karakter perempuan yang tidak kalah penting dengan laki-laki. Dengan adanya pelaksanaan program UP2K dan pelaksanaan tahapan di atas, penulis mendapatkan bahwa pelaksanaan program Usaha UP2K melalui usaha-usaha yang dilakukan di rumah salah satu anggota kelompok sangat membantu perekonomian keluarga, terutama pendapatan bagi ibu rumah tangga (IRT).

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi program usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K) dalam pemberdayaan perempuan di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat dimulai dari *assesment*, perencanan alternatif, tahapan pelaksanaan, tahapan evaluasi dan tahapan terminasi belum berjalan dengan optimal. Hal ini dapat dilihat dari tahapan pelaksanaanya dimana sosialisasi untuk program UP2K ini belum menyeluruh di semua gampong, sehingga tidak semua masyarakat yang mengetahui program UP2K.
2. Kendala dalam pelaksanaan program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) dalam pemberdayaan perempuan di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat adalah pendataan dari gampong tentang angggota UP2K yang kurang tepat sasaran, masih kurangnya donatur yang mau mendanai untuk program UP2K, kurangnya kooperatif anggota UP2K dalam memberitahu tentang penghasilan atau pendapatannya dan pemberian modal usaha yang tidak besar sehinga usaha kurang mengalami pekembangan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka terdapat beberapa saran yang peneliti ajukan, yaitu:

1. Untuk PKK Kecamatan Bubon

   Program UP2K memang sudah berjalan dengan sangat baik, namun akan lebih berkembang lagi apabila tim PKK Kecamatan mensosialisasikan program UP2K ini secara menyeluruh dan memberikan modal usaha diperbesar sehingga memudahkan para anggota untuk mengembangkan usaha rumahannya

2. Untuk Masyarakat

   Program ini merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang sangat memberikan dampak. Namun dampak ini akan terasa apabila adanya kerjasama yang baik diantara semua pihak yang terlibat, dimana masyarakat yang terlibat dalam keanggotaan UP2K harus bersifat kooperatif tentang usaha dan penghasilannya ketika tim monitoring mengevaluasi.

DAFTAR PUSTAKA

Adi, I.R. 2010. *Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo

Amelia Pjt. 2019. Peran Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) Dalam Pemberdayaan Dan Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. *Skripsi:* Fakultas Dakwah Dan Komunikasi. Medan: Universitas Islam Negeri.

Aristo. 2014. *Teori Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: Haji Masagung

Astini, P. 2011. Peran PKK dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui Kegiatan *Home Industry* di Dusun Kaliwaru, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Skripsi* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Aziz dkk. 2011. *Sistem Ekonomi Dan Demokrasi Ekonomi*. Jakarta : Bina Grafika.

Ekautri, A.O. 2012. Gerakan Organisasi Perempuan (PKK) dalam Pemberdayaan Lansia di Gemawang, Sinduadu, Mlati, Sleman Yogyakarta. *Jurnal*: Yogyakarta: Universitas Islan Negeri Yogyakarta.

Fahrudin, M. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.

Harianto, L. 2017. Pemberdayaan Perempuan (*On-Line*), tersedia di *http: // lutfysunk. blogspot.co.idlplpemberdayaan-perempuan.html* (15 November 2020).

Kadar, dkk. 2016, Pengaruh Pemberdayaan Dan Peningkatan Sumberdaya Ekonomi Keluarga, *Jurnal Buana Gender*. Vol. 1 No. 1.

Karsidi. 2014. *Pekerjaan Sosial, dan Kesejahteraan Sosial Sebuah Pengantar.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mardikanto. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi : Tinjauan Teoritik dan Implementasi*. Jakarta: Seminar Sehari Pemberdayaan Masyarakat, Bappenas.

Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung: Rosdakarya

Muhadi. 2011. *Penelitian Tindakan Kelas*. Yogyakarta : Shira Media.

Mulia Astuti, 2012. Pemberdayaan Perempuan Miskin Berbasis Pemanfaatan Sumberdaya Lokal Melalui Pendekatan Sosial Enterpreneurship (Studi Kasus di Daerah Tertinggal, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat). *Jurnal Sosiokonsepsia,* Vol. 17 No. 3.

Nugroho, S. 2011. *Perempuan yang Menuntun*: Sebuah Perjalan Inspirasi dan Kreasi. Bandung: Ashoka Indonesia.

Putri, D.K. 2018. Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) DI Desa Sumber Rejo Kecamatan Waway Karya Lampung Timur. *Skirpsi* Pengembangan Masyarakat Islam Bandar Lampung : Fakultas Dakwah Dan Komunikasi.

Reno, R. 2019. Manfaat Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) Dalam Pemberdayaan Perempuan di Kelurahan Tejosari Kota Metro. Skripsi: Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan

Saptaningsih, R.I. 2015. Pemberdayaan Perempuan Desa Untuk Mengurangi Kemiskinan. *Makalah* yang disampaikan pads Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Universitas PGRI, Yogyakarta.

Slamet, D. 2014. *Pengantar Sosiologi Ekonomi. Edisi ke 3*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Sugiyono. 2012. *Statistika Untuk Penelitian.* Alfabeta: Bandung

Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masayrakat Memberdayakan rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama

Usman, M. 2009. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Bandung: Alfabeta.

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. Proses Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) dalam pemberdayaan perempuan di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat

a) Tahapan *Assesment*

2. Bagaimana latar belakang program UP2K di Kecamatan Bubon ?
3. Bagaimana tujuan dari program UP2K di Kecamatan Bubon ? Apakah sudah tercapai ?

b) Perencanaan Alternatif

3. Bagaimana masyarakat memperoleh bantuan dari program UP2K ?
4. Bagaimana upaya UP2K dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Bubon ?

c) Tahap pelaksanaan (implementasi) program

5. Apa saja program pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga yang telah dilaksanakan oleh UP2K di Kecamatan Bubon ?
6. Siapa saja objek dari program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) di Kecamatan Bubon ?
7. Apakah program UP2K bisa membantu meningkatkan pendapatan keluarga ?

d) Tahap evaluasi proses dan hasil perubahan

8. Apakah dari pihak Kecamatan ada meninjau kembali terhadap objek dari program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) tersebut ?, Jika ada, bagaimana prosesnya ?
9. Bagaimana cara pihak Kecamatan dalam mengevaluasi program UP2K tersebut ?

e) Tahap terminasi

10. Apa harapan program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) terhadap masyarakat ?, jika tidak tercapai, bagaimana untuk program selanjutnya ?

B. Kendala Dalam Pelaksanaan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) dalam pemberdayaan perempuan di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat

1. Bagaimana dampak dari pelaksaaan program UP2K dalam meningkatkan kesejateraan ekonomi masyarakat di Kecamatan Bubon ??
2. Apakah ada perubahan penghasilan setelah ibu menjadi anggota UP2K di Kecamatan Bubon ?
3. Apakah program UP2K di Kecamatan Bubon memberikan dampak positif atau negatif terhadap penghasilan keluarga Ibu ?
4. Apa saja hambatan yang dilalui dalam melaksanakan program UP2K di Kecamatan Bubon ?
5. Bagaiman solusi untuk menanggulangi hambatan yang terjadi ?

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK MASYARAKAT

1. Apakah Ibu mendapatkan bantuan dari program UP2K ?
2. Dimanfaatkan untuk apa bantuan tersebut ?
3. Apakah pernah mendapatkan pembinaan di UP2K, Siapa yang memberikan pembinaan UP2K ?
4. Bagaimana pendapatan ibu setelah mendapatkan bantuan dari UP2K tersebut ?
5. Apakah program UP2K bisa membantu meningkatkan penetapan keluarga ?
6. Apa saja harapan Ibu untuk program UP2K ini ?

Lampiran 2

DOKUMENTASI PENELITIAN

Foto 1: Wawancara dengan Camat Kecamatan Bubon

Foto 2: Wawancara dengan Sekretaris PKK Kecamatan Bubon

Foto 3: Wawancara dengan Ketua POKJA II PKK Kecamatan Bubon

Foto 4: Wawancara dengan Ketua PKK Gampong Blang Sibeutong

Foto 5: Wawancara dengan Ketua PKK Gampong Layung

Foto 6: Wawancara dengan Ketua PKK Gampong Seumuleng

Foto 7: Wawancara dengan Ketua Kelompok UP2K Kecamatan Bubon

Foto 8: Wawancara dengan Wakil Ketua kelompok UP2K Kecamatan Bubon

Foto 9: Wawancara dengan Anggota UP2K Kecamatan Bubon

Foto 10: Wawancara dengan Masyarakat Kecamatan Bubon

Foto 11: Wawancara dengan Masyarakat Kecamatan Bubon

DOKUMENTASI KEGIATAN UP2K DAN PELATIHAN PKK KECAMATAN BUBON

Kegiatan Sosialisasi Program UP2K Kabupaten Aceh Barat

Pelatihan Pembuatan Tas dari Barang Bekas

Pelatihan Pembuatan Kue

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH - ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

Nomor : 441/UN59.5/KM/2021 06 April 2021
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Wawancara Penelitian dan Pengambilan Data untuk Skripsi**

Yth;
Camat Bubon, Kab. Aceh Barat
Di
Tempat

Dengan Hormat;

Sehubungan dengan penulisan skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, maka mahasiswa/i perlu melakukan wawancara penelitian dan pengumpulan data primer dan data sekunder.

Untuk itu kami mohon kepada Bapak agar memberikan izin bagi mahasiswa/ i untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data pada instansi yang Bapak pimpin.
Adapun mahasiswa/ i yang melakukan penelitian adalah :

Nama	: Hernijal
NIM	: 1705905010024
Jurusan	: Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi	: **" Analisis Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat"**
Pembimbing	: Zuhrizal Fadhly, M.Si

Demikian kami sampaikan, atas bantuan serta kerjasamanya kami ucapakan terimakasih.

Wakil Dekan III

Dr. Afrizal Tjoetra, M. Si
NIDN 01-0110-7101

Tembusan:
- Mahasiswa
- Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

KECAMATAN BUBON

Jalan Layung-Gunong Meuh Km. 1

BANDA LAYUNG (Kode Pos 23651) E-mail kec.bubon@acehbaratkab.go.id

Nomor : 423.1/445/2021
Lampiran : -
Perihal : Keterangan Penelitian

Banda Layung, 13 Agustus 2021
Kepada Yth,
Saudara Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar
Kab.Aceh Barat

di-

Tempat

Camat Bubon Kabupaten Aceh Barat dengan ini dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Hernijal
Tempat/Tanggal lahir	: Alue Lhok, 20 November 1999
Alamat	: Gampong Alue Lhok Kecamatan Bubon
Fakultas	: Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Teuku Umar
Judul skripsi	: Analisis Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) dalam Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat.

Benar yang namanya diatas telah menyelesaikan penelitian pada kantor Camat Bubon Kab. Aceh Barat untuk memenuhi persyaratan membuat karangan ilmiah.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat dipergunakan seperlunya.

CAMAT BUBON

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT KECAMATAN BUBON

DRA. MAIMANAH, MA
Pembina
NIP. 19680826 199303 2 004